

**STRATEGI INTERVENSI PEMERINTAH DAERAH DALAM
UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH DI
KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat mengikuti
Sidang Komprehensif Penelitian



Oleh
FADLY MARIS SATRIO
NPM. 20651010241

PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI ABDI NEGARA (STIPAN) JAKARTA
JAKARTA
2023

LEMBAR KOREKSI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF PENELITIAN TESIS

NAMA : FADLY MARIS SATRIO

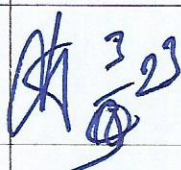
NPM : 20651010241

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

JUDUL TESIS : STRATEGI INTERVENSI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN
BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

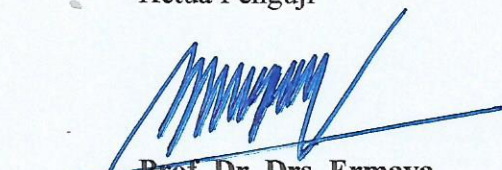
TANGGAL SIDANG : JUNI 2023

NO	DOSEN PENGUJI	SARAN PERBAIKAN	HALAMAN	KET	PARAF /TGL
1.	DR. Rosidi, M.Si	Penjelasan tentang Teknik Analisa Data menggunakan Teori ASOCA	61	Sudah di perbaiki	
		Perbedaan di Halaman 61 dan Halaman 102, dimana Tehnik Analisa Data tidak menyebutkan menggunakan Analisa ASOCA, dan pada Analisa Hasil Penelitian menjelaskan tentang Analisa ASOCA	61 dan 102	Tehnik Analisa Data dan Analisa Hasil Penelitian sudah di perbaiki dengan mengkombinasikan antara Teori Miles dan Hubberman dengan Teori ASOCA	
		Penjelasan Alur Teknik Analisa Data Miles dan Hubberman di Bab IV, Sub Bab 4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	73	Penjelasan terkait alur tehnik analisa data Miles dan Hubberman sudah ditambahkan	
		Penambahan deskripsi ASOCA (Ability, Strength, Opporrtunity, Culture, Agility) sesuai dengan Kondisi Eksisting di Kabupaten Bekasi	103	Penambahan deskripsi dimaksud sudah di koreksi dan di laksanakan	

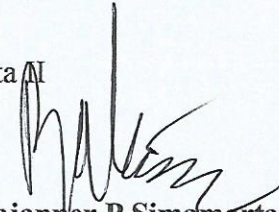
NO	DOSEN PENGUJI	SARAN PERBAIKAN	HALAMAN	KET	PARAF /TGL
2	DR. Sumarsono, MDM	Penjelasan pada teknik analisa data menggunakan teori ahli siapa	61	Sudah di tambahkan	
		Koreksi terhadap Kata Ganti Orang "Beliau" yang digunakan dalam Hasil Penelitian pembahasan terkait narasumber / informan	75-79	Kata Ganti Orang "Beliau" sudah dihapus dan diperbaiki	
3	DR. Rajanner P Simamarta, M.Si	Koreksi di Bab V terkait Saran, Saran disusun untuk dapat mengatasi hambatan yang sudah di jelaskan pada temuan penelitian	133	Koreksi terhadap Bab V Kesimpulan dan Saran sudah diperbaiki	
4	Prof. Dr. Drs Ermaya Suradinata, SH, MH, MS	Apresiasi terhadap penggunaan Teori ASOCA, agar dibuatkan jurnal ilmiah penelitian STIPAN		Jurnal ilmiah akan segera di proses dan di publish melalui mekanisme yang berlaku	

Persetujuan Oleh Tim Penguji

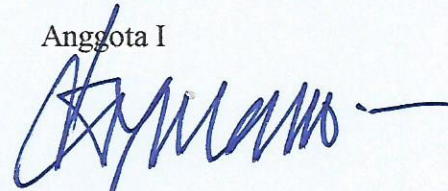
Ketua Penguji


Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS
Tanggal :

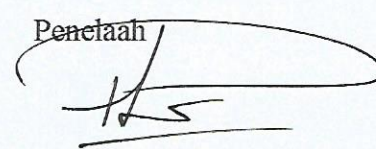
Anggota II


DR. Rajanner P Simamarta, M.Si
Tanggal : 10-07-2023

Anggota I


Dr. Sumarsono, MDM
Tanggal : 10-07-2023

Pencelaah


Dr. Drs. Rosidi, M.Si
Tanggal : 10-07-2023

**STRATEGI INTERVENSI PEMERINTAH DAERAH DALAM
UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH DI
KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh

FADLY MARIS SATRIO

NPM. 20651010241

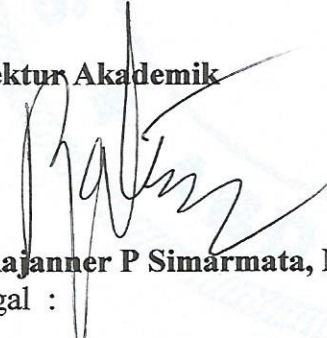
TESIS

Diajukan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan
Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

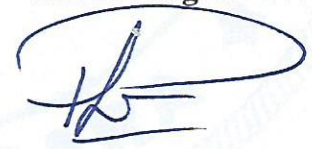
Diperiksa dan Disetujui oleh

Program Pasca Sarjana
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan
Abdi Negara

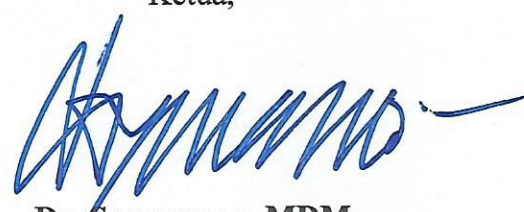
Direktur Akademik


Dr. Rajanner P Simarmata, M.Si
Tanggal :

Ketua Program Studi PPs MIP


Dr. Drs. Rosidi, M.Si
Tanggal :

Mengetahui,
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan
Abdi Negara
Ketua,


Dr. Sumarsono, MDM

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

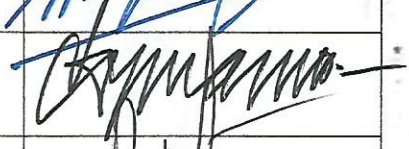
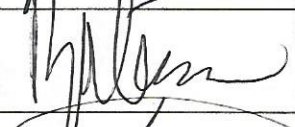
N a m a : Fadly Maris Satrio
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Pebruari 1983
Nomor Pokok Mahasiwa : 20651010241
Judul Tesis : Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat

TESIS

Telah dipertahankan dihadapan Tim Dosen Penguji

Pada Hari Senin, Tanggal 26 Juni 2023

Tim Dosen Penguji

1.	Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS	Ketua	
2.	Dr. Sumarsono, MDM	Anggota 1	
3.	Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si	Anggota 2	
4.	Dr. Rosidi, M.Si	Penelaah	

Diketahui dan Disahkan Oleh :
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

Ketua,



Dr. Sumarsono, MDM

Tanggal : 04 Juli 2023

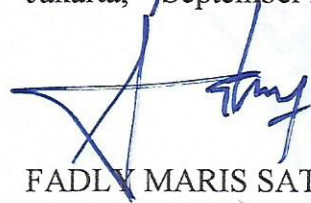
PERNYATAAN KEASLIAN

STRATEGI INTERVENSI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, 5 September 2023



FADLY MARIS SATRIO

NPM : 20651010241

ABSTRAK
STRATEGI INTERVENSI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Oleh
Fadly Maris Satrio

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah setingkat Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, kondisi Kabupaten Bekasi saat ini memiliki potensi sumber daya ekonomi yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan Kabupaten Bekasi memiliki wilayah kawasan industri terbesar yang ada di Asia Tenggara.

Kabupaten Bekasi, sebagai daerah setingkat Kabupaten dengan tingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Barat, memiliki sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang wajib dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut Kabupaten Bekasi telah melaksanakan semua proses perencanaan pembangunan daerah secara efektif sehingga pelaksanaannya tepat waktu, namun tujuan pembangunan hanya dapat dicapai apabila pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di rangkum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan sesuai dengan waktu dan koridor yang telah di tetapkan.

Pada Tahun 2022 RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017 – 2022 telah memasuki tahun kelima (periode terakhir) masih banyak target dan indikator makro pembangunan yang belum tercapai dikarenakan berbagai kondisi dan permasalahan dimulai kasus OTT KPK terhadap Bupati Definitif Hj. Neneng Hasanah Yasin di Tahun 2018 dan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan Kabupaten Bekasi mengalami beberapa pergantian kepemimpinan Kepala Daerah, tentunya hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan roda pemerintahan dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bekasi, oleh karenanya di periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahnya, Kabupaten Bekasi bisa mengambil langkah-langkah yang dipilih sebagai Strategi Percepatan Pembangunan Daerah untuk mencapai target pembangunan melalui capaian indikator makro serta mencari solusi atas kompleksitas permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bekasi.

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti membatasi rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut (1) Bagaimana Strategi Exisiting (Strategi yang saat ini dilaksanakan) oleh Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi ? (2) Apa saja faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat dan pendorong dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi? (3) Bagaimana bentuk Strategi Intervensi tepat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi?

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini antara lain (1) Untuk mengetahui gambaran mengenai strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi saat ini dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat atau pendorong dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi (3) Untuk mengetahui dan merumuskan bagaimana strategi intervensi yang tepat untuk mengatasi hambatan dan/atau meningkatkan potensi peluang dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi

Metode penelitian bersifat kualitatif, yang menggunakan teknik Analisa Data Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dikombinasikan dengan Teknik Analisa Kebijakan menggunakan Teori Asoca (Ermaya

Suradinata, 2013) yang mendeskripsikan hasil analisa data melalui karakteristik dalam Ability (Kemampuan), Strength (Kekuatan), Opportunities (Peluang), Culture (Budaya) dan Agility (Kecerdasan). Analisis ASOCA juga menambahkan unsur Culture (Budaya) dan Agility (Kecerdasan) sebagai unsur yang penting dalam menemukan strategi pemecahan masalah, pengambilan putusan dan dapat dikembangkan dalam mengikuti perubahan, perkembangan zaman dan kebutuhan.

Lokus penelitian adalah Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu daerah tingkat Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, penelitian dilaksanakan pada bulan November Tahun 2022 sampai dengan Mei Tahun 2023.

Hasil penelitian secara garis besar memetakan apa yang menjadi strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Bekasi saat ini dalam pembangunan, kemudian memetakan apa yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam upaya percepatan pembangunan daerah, serta merumuskan strategi intervensi yang tepat dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi melalui beberapa sektor yakni percepatan pembangunan dalam sektor penurunan tingkat pengangguran, Sektor penurunan angka kemiskinan, sektor percepatan infrastruktur wilayah, percepatan pembangunan dalam sektor ekonomi serta percepatan pembangunan sektor penguatan reformasi birokrasi di Kabupaten Bekasi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat ridho-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan Penelitian Tesis dengan Judul “**Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat**” penelitian ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta.

Dalam kesempatan ini penulis tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada yang terhormat:

1. Bapak **Dr. HM Feisal Tamin** Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara;
2. Bapak. **Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata SH, MH, MS** Selaku Wakil Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara;
3. **Bapak. Dr. Sumarsono, MDM** Selaku Ketua STIP-AN RI dan Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan baik moril, bimbingan ilmu, semangat, kepercayaan serta motivasi kepada penulis sehingga Tesis ini dapat saya selesaikan tepat pada waktunya;
4. **Bapak Dr. Sofyan Safari Hamim, M. Si** Wakil Ketua STIP-AN yang selalu memberikan semangat agar kami semua tepat waktu;
5. **Bapak.Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si** selaku Pembimbing Ke 2 dan Sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara yang senantiasa memberi bimbingan dan arahan agar penulisan Tesis ini berjalan dengan sempurna;

6. **Pj Bupati Bekasi Dr. H. Dani Ramdan, MT** beserta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Istri tercinta (**dr. Siti Utami Sri Wulandari**) dan Anak Tersayang (**Muhammad Alviano Satriopratama**) atas kesetiaan dan pengertiannya dalam memberikan support, semangat dan kebahagiaan dalam keluarga;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, Bapak Ir. H. Entah Ismanto, SH, MM yang merupakan mentor terhadap praktik-praktik baik ilmu pemerintahan, dan telah meluangkan waktu dan memberikan data-data sekunder yang dibutuhkan oleh Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi khususnya Jajaran Kabid Sub Koordinator dan para pelaksana di Bappeda

Dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf yang sebesar besarnya apabila ada pihak - pihak yang terlewat atau kurang berkenan baik langsung maupun tidak langsung. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat bermfaat dan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari Pembaca.

Bekasi, Oktober 2023

Penulis,

(Fadly Maris Satrio)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.1.1 Gambaran Kondisi Aktual (Existing) dan Kondisi Yang Diinginkan (Expecting).....	15
1.2 Permasalahan	16
1.2.1. Identifikasi Permasalahan.....	16
1.2.2. Pembatasan Permasalahan.....	18
1.2.3. Perumusan Masalah.....	19
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	19
1.3.1. Maksud Penelitian.....	19
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	21
2.1 Kajian Pustaka.....	21
2.1.1. Teori Ilmu Pemerintahan.....	21
2.1.2. Teori Pemerintah Daerah.....	25
2.1.3. Teori Pembangunan Daerah.....	28
2.1.3.1. Administrasi Pembangunan.....	30
2.1.4. Teori Strategi Intervensi.....	31

2.1.5. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	33
2.1.5.1. Pengertian Perencanaan Pembangunan.....	34
2.1.5.2. Ciri-Ciri Perencanaan Pembangunan.....	35
2.1.5.3. Tahapan Perencanaan Pembangunan.....	35
2.1.5.4. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.....	37
2.1.5.5. Evaluasi Kebijakan Pembangunan.....	40
2.1.6. Teori Metode Analisis ASOCA (<i>Ability, Strenght,</i> <i>Opportunities, Culture dan Agility</i>).....	43
2.2. Kerangka Pemikiran.....	46
2.3. Matriks Operasional Konsep Strategi Intervensi.....	49
 BAB III METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Desain Penelitian.....	51
3.2 Ruang Lingkup Operasional Penelitian.....	52
3.2.1. Tahap-Tahap Penelitian.....	53
3.3. Sumber Data Penelitian.....	55
3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	56
3.4.2. Instrumen Penelitian.....	58
3.5 Teknik Pengukuran Data.....	60
3.6 Teknik Analisa Data.....	60
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	63
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
4.2 Hasil Penelitian.....	73
4.2.1. Reduksi Data.....	73
4.2.2. Penyajian Data Percepatan Pembangunan di Kabupaten Bekasi.....	80
4.2.3. Verifikasi Data Faktor Pendukung dan Penghambat Percepatan Pembangunan.....	89

4.2.4. Strategi Intervensi yang dipilih dalam upaya percepatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pembangunan	89
A. Analisa Hasil Penelitian.....	103
A.1. Faktor Internal.....	105
A.2. Faktor Eksternal.....	112
A.3. Matriks Operasionalisasi Konsep Strategi Intervensi dan Analisa ASOCA	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN I - Pedoman Wawancara	
LAMPIRAN II - Pedoman Observasi	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Administratif Kabupaten Bekasi	7
Gambar 1.2. Hubungan antara kondisi saat ini (existing) dengan kondisi yang di inginkan (expecting).....	10
Gambar 2.1. Matriks Analisis ASOCA	46
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam upaya Percepatan Pembangunan Daerah	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.Matriks Operasional Konsep Strategi Intervensi	49
Tabel 3.1. Jadwal Penyusunan Penelitian Tesis	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut efeknya belum mencakup ke seluruh masyarakat terutama masyarakat yang hidup di pelosok / pedesaan, hal tersebut yang dinamakan pembangunan yang tidak merata.

Di dalam proses pembangunan, sering sekali terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu. hal ini juga dapat menyebabkan hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan dikarenakan adanya perencanaan yang kurang matang atau ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan apa yang sudah direncanakan.

Tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang tepat. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan perencanaan yang baik termasuk dalam hal pengalokasian sumber daya yang tepat. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan juga suatu proses perencanaan pembangunan yang baik. Melalui perencanaan yang baik, akan dapat dirumuskan pemanfaatan semua sumberdaya dan potensi yang

dimiliki, kemudian dikombinasikan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan output pembangunan yang optimal. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang selalu diperlukan, karena kebutuhan akan pembangunan selalu lebih besar dari sumber daya (*resources*) yang tersedia. Terkait dengan perencanaan pembangunan dimaksud, menurut Bintoro (1980), unsur-unsur pokok yang harus tercakup ke dalam perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan atau strategi dasar rencana pembangunan atau sering disebut dengan tujuan, arah, prioritas dan sasaran pembangunan ;
2. Adanya kerangka rencana atau kerangka makro rencana;
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan, khususnya yang digunakan untuk sumber pembiayaan pembangunan tersebut ;
4. Kerangka Kebijakan yang konsisten, berbagai kebijakan perlu dirumuskan kemudian dilaksanakan.

Dalam konteks pembangunan nasional, Perencanaan Pembangunan menjadi penting, mengingat sumber-sumber ekonomi yang semakin terbatas dan akan menjadi habis. Sementara itu, jumlah penduduk yang sangat besar dan beragam. Masalah lain yang juga menjadi sorotan adalah tingkat pendidikan dan kemampuan manajerial yang masih rendah.

Perencanaan yang baik dan berkualitas setidaknya mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil adalah proses penyusunan rencana karena rakyat menentukan pilihannya

berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon kepala daerah. Karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye ke dalam RPJMD.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu (akademisi). Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, dimana rencana hasil proses atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Sedangkan definisi perencanaan pembangunan daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
dan
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
5. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan

Terdapat 3 dokumen perencanaan pembangunan daerah diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu berlakunya, yakni:

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) berlaku selama 20 Tahun, RPJPD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW Daerah/
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) berlaku selama 5 Tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN
3. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) berlaku selama 1 Tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka

ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selaku leading sektor organisasi yang membidangi perencanaan pembangunan, melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah setingkat Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, kondisi Kabupaten Bekasi saat ini memiliki potensi sumber daya ekonomi yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan Kabupaten Bekasi memiliki wilayah kawasan industri terbesar yang ada di Asia Tenggara, Potensi industri kecil, menengah dan besar terus berkembang, potensi perdagangan dan sektor pariwisata serta lahan pertanian produktif serta didukung infrastruktur yang terus berkembang menuju ke arah lebih baik. Dengan modal lokasi Kabupaten Bekasi yang strategis pula menempatkan Kabupaten Bekasi sebagai daerah Penyangga / Penopang Ibukota Negara (DKI Jakarta), otomatis berdampak terhadap pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bekasi yang sangat pesat, hal ini tentunya akan membutuhkan keberhasilan dan ketepatan dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Gambar 1.1.

Peta Administrasi Kabupaten Bekasi



Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah di wilayah administratif Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi berada tepat di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta di barat, Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Karawang di timur, serta Kabupaten Bogor di selatan. Kabupaten Bekasi terdiri atas 23 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 187 desa dan 5 kelurahan. Kabupaten Bekasi sebagai penyangga Ibukota DKI Jakarta pastinya dipengaruhi oleh imbas bonus demografi yang merupakan pendatang yang berasal dari daerah untuk bekerja di Ibukota dan tinggal menetap di Kabupaten Bekasi maupun bekerja di Kabupaten Bekasi. Hal ini tentunya membutuhkan pelaksanaan pembangunan yang baik dan merata.

Keberhasilan dan ketepatan dalam pemerataan pembangunan sangat

tergantung pada proses perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran, apabila dalam hal perencanaan terlaksana dengan baik, maka otomatis hasil yang dicapai akan baik, namun sebaliknya apabila perencanaan yang dilakukan buruk maka akan tercapai pembangunan yang buruk dan terkesan berantakan. Dalam era globalisasi dan internet saat ini, masyarakat semakin dengan mudah menyampaikan aspirasi nya sebagai rakyat, salah satu fasilitasnya adalah melalui Media Sosial, belakangan banyak masyarakat yang memberikan masukan dan saran ketidakpuasan terhadap capaian pembangunan di Kabupaten Bekasi, beberapa diantaranya mengeluhkan tentang isu-isu aktual seperti buruknya infrastruktur yang tersedia, buruknya kualitas lingkungan hidup (persampahan), rendahnya serapan Sumber Daya Manusia lokal terhadap kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri yang tersebar di Kabupaten Bekasi sehingga mengakibatkan masalah tingginya angka pengangguran dan masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah, oleh karenanya, Pemerintah Daerah dalam hal ini harus benar-benar menjawab semua keluhan dari masyarakat tersebut dalam bentuk tindakan konkret berupa percepatan pembangunan yang berkualitas di segala sektor kehidupan.

Kabupaten Bekasi, sebagai daerah setingkat Kabupaten dengan tingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Barat, memiliki sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang wajib dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut Kabupaten Bekasi telah melaksanakan semua proses perencanaan pembangunan daerah secara efektif sehingga pelaksanaannya tepat

waktu, namun tujuan pembangunan hanya dapat dicapai apabila pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di rangkum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan sesuai dengan waktu dan koridor yang telah di tetapkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, yang bersifat makro, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, RPJP Nasional tahun 2015-2019 serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati serta Wakil Bupati periode 2017 - 2022.

Pada Tahun 2022 ini, RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017 – 2022 telah memasuki tahun kelima (periode terakhir). RPJMD Kabupaten Bekasi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 pada tanggal 21 November 2017. Setelahnya, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun terjadinya perkembangan keadaan daerah yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tersebut.

Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah tersebut, di antaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan Jawa Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian telah ditetapkan lokasi prioritas pembangunan wilayah di Jawa Barat serta terdapat beberapa Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang berlokasi di Jawa Barat. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah, sehingga Kabupaten Bekasi harus menyesuaikan beberapa kondisi terkait hal tersebut.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah

daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian evaluasi program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Adapun pencapaian visi misi dalam RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu melaksanakan Visi Kabupaten Bekasi :“Terwujudnya Kabupaten Bekasi BERSINAR (Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, dan Ramah Lingkungan) di Tahun 2022” Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bekasi serta dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bekasi, ditetapkan 8 (delapan) Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi 2017-2022 yang masih terkait dengan visi di atas, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel.
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pariwisata.

4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak.
6. Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih nyaman dan asri melalui penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang terpadu.
7. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang agamis dan tentram melalui pengembangan nilai-nilai budaya lokal.
8. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kondisinya saat ini pelaksanaan ke-delapan misi tersebut, telah sampai pada penghujung periode RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, dimana banyak hal luar biasa yang terjadi yang mempengaruhi pelaksanaan dari delapan misi RPJMD Kabupaten Bekasi tersebut, diantaranya :

1. Terjadinya beberapa kali pergantian Kepala Daerah dan Wakilnya dikarenakan kasus hukum, tutup usia dan habis masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi selama periode RPJMD ini berlangsung.
2. Terjadinya kejadian luar biasa Pandemic Covid-19 di seluruh dunia yang mempengaruhi tatanan kehidupan manusia, juga berdampak pada perubahan program-program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya (Refocussing Anggaran, Efisiensi Anggaran, Penerapan PPKM yang cukup lama dan menghambat pembangunan)
3. Banyak terdapat kekosongan jabatan Kepala Perangkat Daerah dan jabatan-

jabatan struktural lain yang disebabkan oleh Purna Tugas dan Tutup Usia / Wafat dikarenakan terpapar Virus *Covid-19* yang banyak terjadi di Tahun 2020-2021, hal ini menyebabkan laju pelaksanaan program kegiatan juga terhambat dan mengalami kendala.

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi yang mengacu pada pedoman perencanaan lima tahunan yaitu dokumen RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, didapatkan fakta bahwa beberapa capaian target dari RPJMD di Kabupaten Bekasi mengalami kemunduran atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal itu terjadi mengingat kondisi pembangunan daerah saat ini yang dihadapkan pada situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* di Kabupaten Bekasi. Dalam evaluasi yang dilaksanakan pada Tahun 2021 tersebut didapatkan data dan catatan bahwa sebagian besar dari capaian atas indikator sasaran pada RPJMD tidak mencapai target yang telah ditetapkan, indikator makro dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Target 9,78 Capaian 9,70

2. Persentase Penduduk Miskin

Target 4,15 Capaian 5,21

3. Angka Pengangguran Terbuka

Target 4,68 Capaian 10,09

Selain itu terdapat juga beberapa isu-isu aktual di Kabupaten Bekasi yang terjadi dalam Era *Competitive Government* dan Reformasi Birokrasi saat ini, antara lain :

- 1) Isu Persampahan yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat, dimana sempat viral Kali Bekasi yang dipenuhi oleh sampah dan mengalir menuju ke Laut. Hal ini ditindaklanjuti dengan hadirnya Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ke Kabupaten Bekasi untuk mempertanyakan dan menggali masalah kenapa bisa sampai terjadi hal seperti itu.
- 2) Permasalahan *Man Power* di Kabupaten Bekasi yang belum optimal, dikarenakan telah dilaksanakannya penyetaraan jabatan fungsional dengan tujuan penyederhanaan jabatan reformasi birokrasi, namun di ikuti dengan banyaknya jabatan structural yang masih kosong dikarenakan masa pensiun yang bersamaan dan adanya Pandemi Covid 19 gelombang pertama yang banyak memakan korban jiwa
- 3) Kabupaten Bekasi menempati posisi ke-11 (Terbawah) dalam Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- 4) Kabupaten Bekasi menempati peringkat ke-229 dengan predikat Kurang Inovatif dari 450 Kabupaten se-Indonesia dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah (Innovatife Government Awards) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- 5) Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang masih banyak belum mencapai target, dari ke-14 (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah, hanya 5 (lima) yang mencapai target.
- 6) Masih banyaknya permasalahan dalam bidang lain (Infrastruktur, Kemacetan, Lingkungan Hidup, Kesehatan, Ketentraman Ketertiban Umum dan lain sebagainya) untuk dapat segera di atasi bersama untuk perbaikan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Dari permasalahan-permasalahan kompleks diatas, dibutuhkan suatu tindakan percepatan pembangunan yang harus segera dilaksanakan khususnya di periode akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bekasi di Tahun 2022 ini, Pemerintah Daerah harus mengambil langkah-langkah konkret dan tajam dalam pelaksanaan program kegiatan agar target yang ditetapkan dalam RPJMD bisa tercapai dan memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penulis memutuskan untuk membuat usulan penelitian dan penulisan tesis dengan usulan judul : **“Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat”**.

Sebelum beranjak ke pembahasan selanjutnya, penulis ingin menjelaskan tentang gambaran kondisi aktual / saat ini (existing) dengan kondisi yang diinginkan (expecting) dari pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi.

1.1.1. **Gambaran Kondisi Aktual (*Existing*) dan Kondisi yang Diinginkan (*Expecting*)**

a. Kondisi Aktual (*Existing*) Pembangunan Daerah di Kabupaten Bekasi :

- 1) Tidak tercapainya target-target indikator makro RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2021
- 2) Permasalahan / Isu Aktual yang terjadi semakin kompleks dan mendapat perhatian pihak-pihak eksternal
- 3) Target Pendapatan Daerah di Kabupaten Bekasi yang menurun setiap tahun
- 4) Belum ditemukannya sumber-sumber pendanaan pembangunan lain yang potensial
- 5) Masih banyaknya kekosongan jabatan structural yang mengakibatkan lemahnya *Man Power* di Kabupaten Bekasi.

b. Kondisi Ideal (*Expecting*) / Kondisi yang diinginkan dalam Pengembangan inovasi dan Teknologi Daerah :

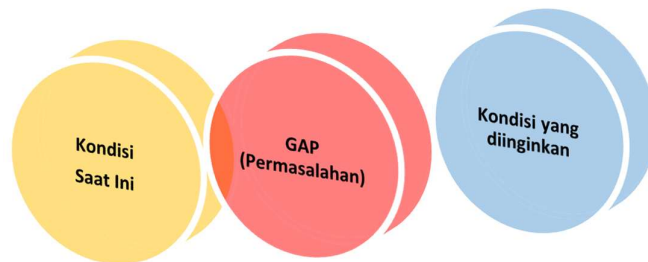
- 1) Tercapainya target-target indikator makro RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2021
- 2) Pemecahan terhadap Isu Aktual dapat segera diatasi
- 3) Peningkatan Target Pendapatan melalui penggalan inovasi potensi sumber pendapatan lain
- 4) Adanya sumber-sumber Pendanaan Pembangunan lain yang potensial
- 5) Terisinya jabatan-jabatan structural yang kosong sehingga memperkuat *Man Power* di Kabupaten Bekasi

1.2. Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Permasalahan

Gambar 1.2.

Hubungan antara Kondisi Saat ini dengan Kondisi Yang Diinginkan



Dalam rangka pencapaian sebuah kondisi yang diinginkan (*expecting*) dari kondisi yang dirasakan saat ini (*existing*), terdapat jarak (*Gap*) yaitu jurang pemisah antara keduanya, yang selanjutnya Jarak / *Gap* ini lebih dikenal dengan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi. Dari pemilihan judul penelitian diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa poin identifikasi masalah yang terkait dengan Capaian Target RPJMD Kabupaten Bekasi di akhir periode 2017 – 2022, identifikasi masalah tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Terjadinya beberapa kali pergantian Kepala Daerah dan Wakilnya dikarenakan kasus hukum, tutup usia dan habis masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi selama periode RPJMD 2017-2022 berlangsung;
2. Terjadinya kejadian luar biasa Pandemi *Covid-19* di seluruh dunia yang mempengaruhi tatanan kehidupan manusia, juga berdampak pada perubahan program-program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya (*Re-*

focusing Anggaran, Efisiensi Anggaran, Penerapan PPKM yang cukup lama dan menghambat pembangunan) selama RPJMD 2017-2022 berlangsung;

3. Masih banyaknya terdapat kekosongan jabatan struktural yang menghambat pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan untuk mendukung Misi-Misi Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Bekasi 2017-2022;
4. Selama periode RPJMD berjalan banyak di turunkan Peraturan-Peraturan dari babPusat yang membutuhkan penyesuaian terhadap keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pelaksanaan Misi di dalam RPJMD Kabupaten Bekasi 2017-2022;
5. Masih banyaknya keluhan dan masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan yang tidak terakomodir dengan baik oleh pemerintah daerah melalui pelaksanaan Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022;
6. Belum adanya suatu tindakan yang signifikan dalam rangka percepatan pembangunan untuk peningkatan capaian target-target RPJMD yang telah ditetapkan khususnya di Tahun 2022 sebagai periode akhir RPJMD Kabupaten Bekasi 2017-2022;
7. Belum adanya inovasi-inovasi dalam pelaksanaan program kegiatan pendukung Visi Misi RPJMD yang dapat mendorong pencapaian target RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022;
8. Masih banyak pola pikir mindset pengambil kebijakan di tingkat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara monoton dan tidak berimprovisasi dalam mengejar capaian target RPJMD yang telah

ditetapkan;

9. Belum Optimalnya pelaksanaan fungsi pengendalian terhadap program kegiatan yang mendukung capaian target RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022;
10. Belum efektifnya penggunaan dana APBD di Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022

1.2.2. Pembatasan Permasalahan

Dalam penyusunan proposal / usulan tesis ini, mengingat dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan dalam biaya penelitian, maka di dalam rangka penyusunan usulan penelitian ini, penulis akan memberlakukan pembatasan permasalahan melalui penetapan Fokus dan Sub Fokus Penelitian, atas dasar tersebut dari beberapa permasalahan yang dihadapi terkait upaya pencapaian target RPJMD Kabupaten Bekasi di Tahun 2022 sebagai periode akhirnya, maka peneliti dapat membatasi Fokus masalah utama yang akan menjadi inti dari penelitian penyusunan tesis ini, yaitu **Belum adanya suatu tindakan yang signifikan dalam rangka percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi**, dan sub fokus dari masalah tersebut yakni **Strategi Intervensi seperti apakah yang tepat untuk diambil dalam rangka percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi**.

Perumusan strategi intervensi yang tepat ini nantinya akan dapat menemukan solusi atau jalan keluar yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Bekasi dalam mengatasi permasalahan lain terkait percepatan pembangunan

daerah. Lokus dari permasalahan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dapat memberikan Strategi Intervensi yang tepat dalam rangka percepatan pembangunan di daerahnya.

1.2.3. Perumusan Masalah

Atas penjelasan hal tersebut adapun perumusan masalah dari usulan penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi *Exisiting* (Strategi yang saat ini dilaksanakan) oleh Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi
2. Apa saja faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat dan pendorong dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana bentuk Strategi Intervensi tepat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk menggali strategi intervensi apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, penulis dalam mengadakan penelitian tersebut memiliki tujuan sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi saat ini dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat atau pendorong dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi;
3. Untuk mengetahui dan merumuskan bagaimana strategi intervensi yang tepat untuk mengatasi hambatan dan/atau meningkatkan potensi peluang dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari aspek teoritis akan diperoleh pemahaman baru terkait dengan Strategi Intervensi yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan daerah.
2. Dari aspek praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelenggaraan pembangunan yang sedang menghadapi permasalahan yang sama dalam upaya percepatan pembangunan di daerahnya, penelitian ini juga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi ke depannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Teori Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan (*public policy*). Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan *decision making* (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah).

Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas), dan menurut Surya Ningrat, pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah.

Secara etimologi, maka pengertian pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh (2 pihak yaitu yang memerintah dan yang diperintah).

2. Pemerintah (Pe) berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah
3. Pemerintahan (akhiran -an) berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah” adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Dalam artian yang sempit, pemerintahan adalah meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif saja (kalau menurut teori *Van Vollenhoven*, hanya meliputi “*bestuur*” saja).

Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan adalah meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif memiliki tujuan untuk mewujudkan negara.

Menurut Budiarjo pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Menurut Talizidhuhu Ndraha, dalam *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Yang dimaksud pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan

menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Menurut Muhadam Labolo pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.

Riyaas Rasyid (2002) dalam buku *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* menjelaskan bahwa tujuan Pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar, dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Dalam Etzioni (1985) organisasi yang disebut Weber sebagai birokrasi menentukan norma-normanya sendiri yang harus dilaksanakan. Organisasi akan berjalan dengan efektif apabila semua peraturan ditaati oleh anggota. Organisasi dapat menggunakan kekuasaannya yang dimiliki dengan memberikan ganjaran bagi yang taat atau hukuman bagi yang membangkang agar para anggota menaati peraturan yang ada. Sedangkan menurut Pasolong dalam Supriadi Legino menjelaskan bahwa birokrasi adalah organisasi yang dipimpin oleh pejabat pemerintah dibawah menteri yang memiliki tugas utama sebagai pemberi pelayanan. Birokrasi yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan

umum dan pembangunan, seringkali oleh masyarakat diartikan dalam konotasi yang berbeda.

Tugas pokok birokrasi adalah secara profesional menindaklanjuti keputusan politik yang diambil pemerintah dan mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Menurut Morgan (1997), organisasi sektor publik atau birokrasi, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang organisasi sebagai mesin menekankan pada perlunya kecepatan, ketelitian, kejelasan, keteraturan, keandalan dan efisiensi yang dicapai dengan cara membangun divisi-divisi, hierarki dan berbagai aturan sebagai bentuk pembagian kerja yang tegas.

Menurut Tamin, terdapat empat fungsi yang diemban sebuah birokrasi negara, yaitu:

1. Fungsi instrumental, yaitu menjabarkan kebijakan perundang-undangan dan kebijaksanaan publik dalam kegiatan-kegiatan rutin untuk memproduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu.
2. Fungsi politik, yaitu memberi input berupa saran, informasi, fisik, dan profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan.
3. Fungsi katalis publik interest, yaitu mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan publik dan mengintegrasikan ke dalam kebijaksanaan dan keputusan pemerintah.
4. Fungsi entrepreneurial, yaitu memberikan inspirasi bagi kegiatan-kegiatan inovatif, mengaktifkan sumber-sumber potensial yang ideal dan menciptakan

resource-mix yang optimal untuk mencapai tujuan.

Adapun tugas pemerintah menurut Kaufman dalam Thoha adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan atau power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Hakikat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu: Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), dan Pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, Pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan Pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

2.1.2. Teori Pemerintah Daerah

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan

pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada di tangan pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk erda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu bentuk dari manajemen pemerintahan daerah adalah melakukan penataan daerah yang ditujukan untuk :

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
5. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
6. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah

Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan

politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional. Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan pada asas-asas pelayanan publik yang meliputi: pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat; pelayanan konsultasi; dan pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik, pemerintah daerah dapat membentuk forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Teori Pembangunan Daerah

Pengertian Pembangunan menurut Rogers dalam Nasution (2007) adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Adapun tujuan pembangunan, menurut Nasution (2007)

terbagi atas 2 bagian :

1. Tujuan Umum Pembangunan adalah suatu proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan.
2. Tujuan Khusus Pembangunan ialah tujuan jangka pendek, pada tujuan jangka pendek biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu.

Pada hakikatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang baik berdasarkan norma-norma tertentu. mengenai pengertian pembangunan para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam yaitu :

1. Siagian (2005:4) menjelaskan bahwa pembangunan adalah sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, Negara dan pemerintah maju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.
2. Todaro (1998 dalam Listi Yaningsih, 2014) mengatakan pembangunan adalah proses multimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*) pemberantasan kemiskinan absolut.
3. Afifudin (2012:42) Pembangunan adalah perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Dimana kondisi yang lebih baik harus dilihat dari

dalam cakupan dari keseluruhan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti penting dalam taraf kehidupan, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan lainnya, karena dapat dipastikan bahwa suatu segi kehidupan mampu saling berkaitan erat dengan segi-segi lainnya.

4. Todora Smith (2006:28) Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad masyarakat untuk berupaya keras, sebisa mungkin dalam melalui serangkaian kombinasi proses social, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu merupakan suatu proses kegiatan usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat, dan pada prinsipnya menuju kepada arah yang lebih baik. Pembangunan suatu bangsa tidak hanya dilakukan tidak hanya dilakukan dan dibedakan kepada sekelompok orang saja melainkan juga harus melibatkan rakyat banyak yang juga akan menjadi subjek dan sekaligus objek dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan merupakan semacam arah perjalanan yang sedang ditempuh manusia pada saat tertentu, sehingga sejauh mungkin harus mengikutsertakan masyarakat untuk menentukan pilihan-pilihannya yang mendasar.

2.1.3.1. Administrasi Pembangunan

Sebagai bidang studi, administrasi pembangunan berkembang dari suatu administrasi pembangunan (*comparative administration*), yang merupakan upaya untuk menyegarkan kembali ilmu administrasi dan untuk penyempurnaan system administrasi di negara-negara tersebut. Perkembangan ilmu administrasi pembangunan didorong oleh lembaga internasional terutama Perserikatan Bangsa-

Bangsa dan badan-badannya, serta badan-badan pemerintah di megara maju yang berupaya membantu megara-negara berkembang dalam pembangunannya. Administrasi pembangunan sesungguhnya meliputi dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan.

Andrew Dunser dalam Lukman Hakim (2016:37) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya ditentukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Siagian dalam Lukman Hakim (2016:38) Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modrenitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

2.1.4. Teori Strategi Intervensi

Intervensi itu sendiri menurut pendapat para Ahli adalah sebagai berikut:

1. Intervensi menurut pendapat Dr. Wirjono Prdojodikoro, SH, mendefinisikan bahwa Intervensi sebagai bagian dalam hukum internasional, *intervention* / intervensi tidak berarti luas sebagai segala bentuk campur tangan negara asing dalam urusan satu negara, melainkan berarti sempit, yaitu suatu campur tangan

negara asing yang bersifat menekan dengan alat kekerasan (*force*) atau dengan ancaman melakukan kekerasan, apabila keinginannya tidak terpenuhi.

2. Intervensi Menurut Oppenheim Lauterpacht, mengatakan bahwa pengertian intervensi adalah campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negeri tersebut.
3. Intervensi menurut J.G. Starke, ia mengatakan intervensi ini dengan istilah *subversive intervention*. Menurut J.G. Starke bahwa definisi intervensi adalah “Mengacu kepada propaganda atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mendorong terjadinya revolusi atau perang saudara di negara lain,”
4. Pengertian Intervensi Menurut Black’s Law Dictionary Menurut *Black’s Law Dictionary* bahwa pengertian Intervensi adalah “*one nation’s interference by force, or threat of force, in another nations’s internal affair or in question arising between other nation,*”
5. Pengertian Intervensi Menurut James Rosenau Menurut James Rosenau bahwa pengertian intervensi dapat dibedakan dari instrument politik luar negeri lainnya melalui dua faktor:
 - Bahwa intervensi membedakan diri dengan tajam dalam hal cara menyelenggarakan hubungan antar negara yang konvensional.
 - Bahwa intervensi secara sadar dilakukan untuk mengakibatkan perubahan

politik yang mendasar di negara yang dijadikan sasaran intervensi.

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Strategi Intervensi merupakan salah satu turunan terapan dari Manajemen Strategi, Strategi Intervensi dapat diartikan sebagai suatu rencana strategi yang disusun oleh suatu organisasi untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasinya tersebut dengan memanfaatkan sumberdaya perusahaan secara efektif dan efisien demi untuk mencapai visi organisasi dengan cara-cara sistematis yang hanya diketahui oleh organisasi tersebut.

2.1.5. Perencanaan Pembangunan Daerah

2.1.5.1. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Definisi dasar dari sebuah perencanaan yang mana diartikan sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Tjokroamidjojo, 1984), sama halnya dengan definisi dari perencanaan pembangunan. Selanjutnya Tjokroamidjojo (1984), mengartikan perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah pengambilan alternatif yang dianggap alternatif terbaik dengan sumber daya yang tersedia secara tepat. Perencanaan pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, dibuat secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk

masa yang akan datang (Soekartawi, 1990).

Berdasarkan pengertian perencanaan pembangunan di atas, maka pengertian perencanaan pembangunan dapat disimpulkan sebagai proses pemikiran yang mengarahkan sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu juga mengupayakan berbagai alternatif yang dianggap sebagai alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Pemilihan alternatif yang paling baik diharapkan mampu mencapai suatu tujuan yang berguna bagi kualitas pembangunan kedepannya.

2.1.5.2. Ciri Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan memiliki ciri-ciri tersendiri yang dengan mudahnya dapat dibedakan

dengan perencanaan yang lain. Menurut Tjokroamidjojo (1984), ciri-ciri suatu perencanaan pembangunan bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang berkaitan dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*). Secara rinci, menurut Tjokroamidjojo (1984) perencanaan pembangunan memiliki ciri- ciri sebagai berikut:

- a. Suatu rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady economic growth*)
- b. Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita
- c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi
- d. Perluasan kesempatan kerja
- e. Usaha pemerataan pembangunan
- f. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih

menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan

- g. Kemampuan membangun lebih didasarkan pada kemampuan sosial
- h. Terdapatnya usaha secara terus menerus dalam menjaga stabilitas ekonomi
- i. Ada pula negara-negara yang mencantumkan sebagai tujuan pembangunan hal-hal yang fundamental/ideal atau yang bersifat jangka panjang.

Jika disimpulkan, maka sesuai dengan ciri-ciri yang telah diuraikan di atas, perencanaan pembangunan harus dilakukan sebagaimana mestinya agar memperoleh hasil yang baik. Sumber daya yang ada harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Perencanaan juga berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mendorong dan menjadikan pembangunan dengan perspektif jangka panjang.

2.1.5.3. Tahap Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan melewati beberapa tahapan untuk mencapai hasil yang terbaik. Adapun menurut Tjokroamidjojo (1984) tahap-tahap dalam proses perencanaan adalah:

a. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana terdiri dari unsur-unsur:

- 1) Tinjauan keadaan. Berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana (*review before take off*) atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya (*review of performance*). Kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi, seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai, hambatan-hambatan yang masih ada, dan potensi-potensi serta prospek yang masih bisa

dikembangkan.

- 2) Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana (*forecasting*). Diperlukan data-data statistik, berbagai hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi. Mekanisme informasi untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan perspektif masa depan.
- 3) Penetapan tujuan rencana (*plan objectives*) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Seringkali nilai-nilai politik, sosial masyarakat, begitu memainkan peranan yang sangat penting dalam penetapan dan pencapaian tujuan agar memperoleh hasil yang terbaik.
- 4) Tahap persetujuan rencana. Proses pengambilan keputusan memiliki tingkatan dari keputusan di bidang teknis kemudian mengarah ke proses politik.

b. Penyusunan Program Kerja

Melakukan perumusan lebih rinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerjasama antara lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Seringkali program kegiatan dan pembiayaan yang konkrit daripada program-program atau proyek-proyek pembangunan tersebut dalam *project form*. Bahkan ini menjadi alat rencana, alat pembiayaan, alat pelaksanaan dan alat evaluasi rencana yang penting.

c. Pelaksana Rencana

Hal ini seringkali perlu dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap konstruksi dan

tahap operasi. Perlu dipertimbangkan karena sifat kegiatan berbeda-beda. Tahap pelaksanaan operasi perlu dipertimbangkan kegiatan- kegiatan pemeliharaan.

d. Pengendalian terhadap Pelaksanaan

Tujuan dari pengendalian adalah:

- 1) Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan ketentuan rencananya.
- 2) Apabila terdapat penyimpangan, maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut sudah terjadi dan diambil langkah-langkah strategis untuk mengembalikan pelaksanaan kegiatan kembali pada jalur yang ditetapkan.

2.1.5.4. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD – RPJMD)

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 RKPD merupakan singkatan Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD memuat rencana kerangka ekonomi daerah, program prioritas bidang pembangunan daerah dan rencana kerja pendanaan dan perkiraan maju.

Sedangkan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan ditetapkan dengan peraturan Daerah. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pimpinnya yang dijabarkan dalam bentuk RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagian acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dikendalikan dan dievaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), pengendalian berupa pengendalian kebijakan dan penegendalian pelaksanaan serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan.

Pemerintah Daerah menyusun RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD dengan tahap penyusunan RKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD.
2. Penyusunan rencana awal RKPD.
3. Penyusunan rancangan RKPD.
4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
5. Perumusan rancangan akhir RKPD.
6. Penetapan RKPD.

Penyusunan RKPD harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan RPJMD. Penyusunan RKPD mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan

pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran I Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi RKPD yang meliputi:

1. Pengendalian kebijakan.
2. Pengendalian pelaksanaan.
3. Evaluasi hasil.

Pengendalian kebijakan bertujuan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKP.

Pengendalian pelaksanaan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pelaporan Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Evaluasi hasil dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian kinerja program atau kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan pada dokumen RKPD.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rancangan kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengaju kepada Rancangan Kerja Pemerintah (RKP)

2.1.5.5. Evaluasi Kebijakan Pembangunan

Evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau keberhasilan kebijakan, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah tercapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan untuk menilai sejauh mana tujuan dicapai.

Menurut Nugroho (2014), tujuan pokok dari evaluasi adalah bukan untuk menyalah-nyalahkan, tetapi untuk mengetahui seberapa besar pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah:

- a. Tujuannya menemukan hal-hal strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
- b. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana

kebijakan, dan target kebijakan

- c. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
- d. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
- e. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan

Evaluasi Kebijakan Menurut William, N. Dunn (1999) dalam Nugroho (2014), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pembagian angka (rating), dan penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan menghasilkan informasi yang valid dan manfaat hasil kebijakan. Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik; memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target; memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan (Nugroho, 2014).

Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik dengan tabel berikut :

Tabel 2.1.

Kriteria Evaluasi Menurut Dunn

Tipe kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan

Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost-benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap, Efektivitas tetap.
Tipe kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls.
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien.

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga menurut waktunya, yaitu pada saat sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses, sedangkan evaluasi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan. Evaluasi setelah pelaksanaan disebut juga evaluasi sumatif.

Tabel 2.2.

Pendekatan dalam Evaluasi Semu versi Dunn

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-bentuk	Teknik
Evaluasi semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	• Eksperimental sosial • Akuntansi sistem sosial • Pemeriksaan sosial. • Sintesis riset dan praktik.	• Sajian grafik • Tampilan tabel • Angka indeks • Analisis seri waktu terinterupsi • Analisis seri terkontrol • Analisis diskontinu uregresi.

2.1.6. Teori Metode Analisis ASOCA (*Ability, Strenght, Opportunities, Culture dan Agility*)

Analisis tata kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya menggunakan analisis SWOT saja, namun juga dapat dianalisa secara lebih spesifik menggunakan analisis ASOCA. Analisis ASOCA adalah identifikasi sebagai faktor sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kemampuan, kekuatan, peluang, budaya atau kebiasaan dan kecerdasan atau ketajaman berpikir (*agility*) secara keseluruhan dapat meminimalisir. ancaman dan memenangkan persaingan dalam dunia bisnis. Dalam mengambil keputusan, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal yang meliputi kemampuan, kekuatan, dan kelemahan serta faktor eksternal yang meliputi peluang, budaya, dan kecerdasan atau ketajaman pemikiran konsumen. Analisis

ASOCA digunakan jika penentu strategi perusahaan mampu memaksimalkan peran faktor kemampuan, kekuatan dan manfaat peluang dan kecerdasan konsumen sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalkan kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan ancaman yang timbul dan harus ditangani dengan tepat. Analisis ASOCA juga dapat digunakan untuk membantu analisis strategi dan referensi logis dalam diskusi sistematis tentang situasi perusahaan dan alternatif situasi perusahaan, serta alternatif utama yang mungkin dipertimbangkan perusahaan (Misrofinhah, 2020: 126-127).

Menurut Ermaya (2013: 18), ASOCA merupakan singkatan dari: *Ability* (Kemampuan), *Strength* (Kekuatan), *Opportunities* (Peluang), *Culture* (Budaya) dan *Agility* (Kecerdasan). Analisis ASOCA menambahkan unsur *Culture* (Budaya) dan *Agility* (Kecerdasan) sebagai unsur yang penting dalam menemukan strategi pemecahan masalah, pengambilan putusan dan dapat dikembangkan dalam mengikuti perubahan, perkembangan zaman dan kebutuhan. Sinergitas elemen-elemen ASOCA sangat penting dikelompokkan ke dalam lingkungan strategis internal dan eksternal yang dapat dibuat dalam bentuk matriks analisis ASOCA. Matriks analisis ini cocok dengan Indonesia yang majemuk dan memiliki letak strategis di dunia. Merujuk pada pembagian faktor dalam penjelasan analisis ASOCA, hal tersebut dibagi menjadi dua hal yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor internal dalam analisis ASOCA adalah *Ability*, *Strengths* dan *Agility*. Sementara untuk faktor eksternal meliputi *opportunities* dan *cultures*. Keenam faktor internal-eksternal ini disusun sebagai sebuah matriks yang dikenal sebagai Matriks Sebelas Kotak.

Tabel 2.3

Matriks Sebelas Kotak

FAKTOR EKSTERNAL	FAKTOR INTERNAL	ABILITY (KEMAMPUAN)	STRENGTHS (KEKUATAN)	AGILITY (KECERDASAN)
OPPORTUNITIES (PELUANG)	(A)	MENGGUNAKAN KEMAMPUAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG	(C)	(E)
			MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG	MENGGUNAKAN KECERDASAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG
CULTURE (BUDAYA)	(B)	MELIHAT KEMAMPUAN UNTUK MENGHADAPI TUNTUTAN LINGKUNGAN BERBUDAYA	(D)	(F)
			MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK TANGGAP TERHADAP PENGARUH PERUBAHAN BUDAYA	MENGGUNAKAN KECERDASAN UNTUK MENSIASATI PENGARUH PERUBAHAN BUDAYA

Gambar di atas menampilkan Matriks Sebelas Kotak, yang melihat organisasi dari faktor internal organisasi yaitu *ability*, *strengths*, dan *agility* serta melihat faktor eksternal yaitu *opportunities* dan *culture*. Enam kotak lainnya merupakan tindakan yang harus dilakukan organisasi ketika faktor internal organisasi diperhadapkan dengan faktor eksternal. (Ermaya, 2013:19-20).

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian. Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiyono, 2017: 92).

Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang didapat dari berbagai sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka pemikiran. Pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi pemahaman-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu:

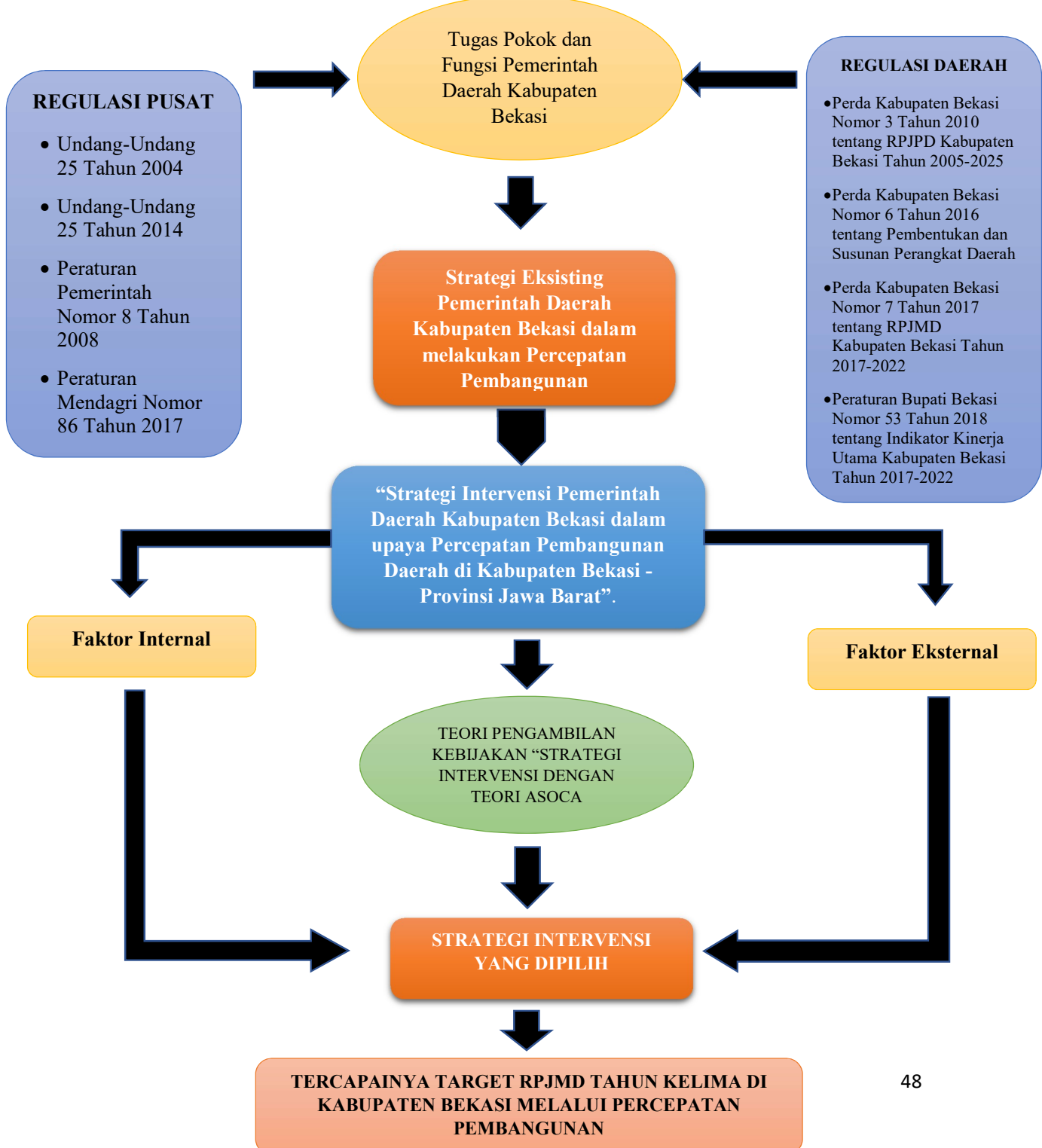
“Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Percepatan Pembangunan di Kabupaten Bekasi-Provinsi Jawa Barat”.

Strategi Intervensi dapat diartikan sebagai suatu rencana strategi yang disusun oleh suatu organisasi untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasinya tersebut dengan memanfaatkan sumberdaya perusahaan secara efektif dan efisien demi untuk mencapai visi organisasi dengan cara-cara sistematis yang hanya diketahui oleh organisasi tersebut. Sedangkan Percepatan Pembangunan Daerah adalah serangkaian upaya-upaya terstruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan stakeholder untuk dapat meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan pembangunan melalui usaha-usaha ekstra yang dilaksanakan secara cepat dan lebih tepat sasaran. Kerangka berpikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten

Bekasi dalam upaya Percepatan Pembangunan Daerah



2.3. Matriks Operasional Konsep Strategi Intervensi

Tabel 2.4.

Operasionalisasi Konsep Strategi Intervensi

Judul	Dimensi	Fokus / Sub Fokus	Indikator / Sub Indikator
Strategi Intervensi Pemerintah Daerah dalam upaya Percepatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat	1. Lingkungan Internal : Faktor-Faktor : a) Kapasitas Fiskal yang kuat b) Kecakapan Kepala Daerah c) Kapabilitas SDM aparatur d) Efektivitas Penggunaan Anggaran e) Kondisi Geografis Kabupaten Bekasi	1.1. Ability (Kemampuan)	Strategi AbO Menggunakan Kapasitas Fiskal dalam mengoptimalkan kinerja dalam rangka percepatan pembangunan
		1.2. Strengths (Kekuatan)	Strategi SO Menggunakan Kecakapan Kepala Daerah dalam rangka percepatan pembangunan
		1.3. Agility (Kecerdasan)	Strategi AgO Menggunakan potensi Kapasitas SDM Aparatur dalam rangka percepatan pembangunan
	2. Lingkungan Eksternal : Faktor-Faktor : a) Sosial Kultur Masyarakat b) Peran Serta Perusahaan / Sektor Swasta c) Aspirasi / Kebutuhan Masyarakat d) Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi e) Infrastruktur Prasarana Wilayah	2.1 Opportunities (Peluang)	Strategi AbC Mengoptimalkan Kapasitas Fiskal yang dimiliki untuk mengelola kerjasama dengan para stakeholder melalui model Pentahelix
		2.2. Culture (Budaya)	Strategi SC Mengoptimalkan Kecakapan Komunikasi Kepala Daerah untuk mempersatukan

			dan mengoptimalkan kolaborasi antar Stakeholder di Kabupaten Bekasi
			Strategi AgC Memadukan perkembangan teknologi dalam menyebarkan informasi percepatan pembangunan

Keterangan :

- 1) Strategi AbO = Menggunakan kemampuan untuk memanfaatkan peluang
- 2) Strategi SO = Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
- 3)
- 4) Strategi AgO = Menggunakan kecerdasan untuk memanfaatkan peluang
- 5) Strategi AbC = Melihat kemampuan untuk menghadapi tuntutan lingkungan perubahan budaya
- 6) Strategi SC = Menggunakan kekuatan untuk tanggap terhadap pengaruh perubahan budaya
- 7) Strategi AgC = Menggunakan kecerdasan untuk mensiasati pengaruh perubahan budaya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Lebih lanjut Nazir menyatakan, jenis desain penelitian ada enam yaitu :

- a. Desain penelitian yang ada kontrol.

Desain ini adalah desain percobaan atau desain bukan percobaan dan mempunyai kontrol.

- b. Desain penelitian Deskriptif-analitis.

Desain penelitian deskriptif merupakan studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan desain penelitian analitis adalah studi untuk menguji hipotesa-hipotesa dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan.

- c. Desain penelitian lapangan atau bukan. Penelitian ini menggunakan lapangan atau tidak.

- d. Desain penelitian dalam hubungan dengan waktu. Penelitian dengan menggunakan interval waktu tertentu.

- e. Desain dengan tujuan evaluatif atau bukan.

Desain penelitian evaluatif atau bukan berhubungan dengan keputusan administratif terhadap aplikasi hasil penelitian.

- f. Desain penelitian dengan data primer/sekunder.

Dalam penelitian dapat didesain menggunakan data primer atau data sekunder.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menemukan fakta dan menginterpretasikan tentang strategi intervensi seperti apa yang tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi.

Penelitian yang berjudul *Strategi Intervensi Pemerintah Daerah dalam upaya Percepatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bekasi - Provinsi Jawa Barat* ini bersifat menggambarkan dan menjelaskan secara tepat mengenai suatu organisasi, keadaan, gejala atau kondisi tertentu.

3.2. Ruang Lingkup Operasional Penelitian

Ruang Lingkup penelitian yang dilakukan penulis adalah ruang lingkup penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sanusi (2011:13) metode deskriptif kualitatif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dan subjek atau objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi, untuk kemudian dirumuskan strategi intervensi yang tepat melalui beberapa opsi strategi dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif, yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain. Atau penelitian yang

didalamnya mengutamakan untuk pendiskripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses bagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakekat proses tersebut.

Selain penelitian kualitatif, peneliti juga menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian tentang fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Dalam penelitian kualitatif di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi ini akan memperoleh data hasil wawancara dari Penjabat Bupati Bekasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Plt. Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait serta beberapa masyarakat mengenai fakta-fakta terkait eksisting hasil Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bekasi serta fakta mengenai Strategi Intervensi Pemerintah Daerah dalam upaya Percepatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bekasi. Dalam penelitian kualitatif ini juga akan memperoleh data dari hasil catatan laporan dan dokumen mengenai pelaksanaan RPJMD sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Bekasi

3.2.1. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pendahuluan atau Persiapan

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan Strategi Intervensi, Teori Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Teori Pembangunan, Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan serta beberapa peraturan perundang-undangan. Menyusun proporsisi-proporsisi dari fokus dan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan teori/konsep tentang Strategi Intervensi

Percepatan Pembangunan Daerah. Tahap ini juga dilakukan dengan proses penyempurnaan penyusunan proposal, sampai akhirnya disetujui dan diterima.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini mulai dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi. dengan menggunakan metode penelitian dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan secara jelas yang berkaitan dengan hasil penelitian tentang Strategi Intervensi Bappeda Kabupaten Bekasi dalam rangka pencapaian target RPJMD Tahun Kelima melalui Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah, Pembahasan, pengecekan keabsahan data dan analisis data juga dilakukan pada tahapan ini.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir yakni menyusun laporan penelitian. Sebagai akhir dari hasil laporan penelitian ini adalah upaya terwujudnya hasil laporan penelitian dalam bentuk tesis. Yang mana terkait dengan keseluruhan data yang telah didapatkan tadi diwujudkan dalam bentuk laporan yang telah tersusun secara rapi.

3.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan susunan pejabat struktural terkait dari unsur pimpinan hingga pelaksana.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, melainkan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- c. Buku-buku yang berkaitan dengan Percepatan Pembangunan Daerah,

- d. Capaian hasil pembangunan di Kabupaten Bekasi
- e. Keterkaitan antara target dan capaian pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi

3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Sejalan dengan paparan mengenai sumber data, maka metode pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti adalah :

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila:

- Sesuai dengan tujuan penelitian,
- Direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan
- Dapat dikontrol kendalanya (reabilitasnya) dan kesasiannya (validitasnya).

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang mengharuskan penulis hadir di lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, informan, kegiatan, benda- benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan guna mengumpulkandata mengenai program, proses, atau perilaku pada tangan pertama. Observasi dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks

dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.

Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi terhadap lokasi yang akan diteliti, di samping tempat yang diteliti peneliti juga melakukan observasi mengenai kegiatan-kegiatan yang mencerminkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam upaya melaksanakan percepatan pembangunan daerah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan tersebut, peneliti mencatat dan merekam dengan teliti untuk kemudian dijadikan bahan kajian penelitian sehingga memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang diteliti.

2. Wawancara mendalam

Menurut Moleong, wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu”. Wawancara ini dilakukan dengan maksud memperoleh konstruksi sesuatu yang terjadi sekarang, rekonstruksiseseuatu berdasarkan pengalaman masa lalu, proyeksi sesuatu yang diharapkan bisa terjadi di masa mendatang, pengecekan dan pengembangan informasi. Penulis menerapkan wawancara (interview) dengan mengajukan pertanyaan kepada informan secara langsung berhadapan muka secara bebas menuju fokus penelitian sekaligus mencatat garis besar hasil wawancara sebagai catatan di lapangan yang kemudian perlu ditindak lanjuti.

Dalam melaksanakan tahapan wawancara, peneliti akan terjun langsung ke lokus penelitian, Peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung kepada semua stakeholder terkait pelaksana urusan pemerintah daerah di Kabupaten Bekasi.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan Pj Bupati Bekasi, Sekretaris Daerah dan Asisten Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala BPKD serta Unsur Pejabat dari beberapa Perangkat Daerah, untuk menggali informasi dan memperoleh data-data yang relevan dengan pokok kajian penelitian, sehingga diharapkan dapat memperoleh informasi yang sesuai dan dapat mengumpulkan data secara akurat serta memadai.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik dokumentasi ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan kedua metode yang telah lebih dulu disebutkan diatas, yakni wawancara mendalam dan observasi. Dokumentasi yang dimaksud berupa foto wawancara dan observasi, catatan observasi dan wawancara, dan dokumentasi lain yang mendukung kajian penelitian.

3.4.2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang disusun (dikonstruksi), sesuai dengan fungsinya, maka disesuaikan dengan ukuran-ukuran yang akan direkam dan

metode pengumpulan data yang akan dipakai, baik format, item maupun optionnya. Dalam penelitian ini peneliti merupakan instrument utama dalam pengumpulan data, peneliti mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti dituntut untuk memahami bagaimana para subyek berpikir, pendapat, berperilaku sesuai dengan apa yang ia lakukan sehari-hari dalam kehidupannya. Hal ini dilakukan secara mendalam dan terus-menerus sehingga peneliti menghabiskan waktunya dengan para subyek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dikarenakan, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu, hanya manusia sajalah sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusia saja yang mampu memahami kaitan kenyataan di lapangan. Dengan demikian, peneliti menjadi instrument utama yang berfungsi tidak hanya sebagai pengumpul data melainkan sekaligus menganalisa data. Seandainya ada informasi yang belum lengkap maka peneliti berusaha kembali ke lokasi penelitian sehingga mendapatkan informasi baru yang dibutuhkan. Kemudian untuk bisa menjadi instrumen utama peneliti melibatkan diri dalam situasi sosial, berusaha dapat berpartisipasi pada aktivitas-aktivitas yang terjadi dan selalu berada dalam situasi sosial yang diteliti

3.5. Teknik Pengukuran Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan pengukuran terhadap keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi teori adalah penelitian yang menggunakan beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dokumentasi dari berbagai sumber.

Triangulasi dilakukan untuk mencari titik temu atau mencocokkan informasi yang didapatkan sehingga bisa dipertanggung jawabkan. Triangulasi dilakukan dalam sebuah penelitian sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan waktu. Triangulasi ada dua, yakni :

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas penelitian ilmiah dengan melalui cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila dengan cara ini telah dikemukakan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi dengan sumber data yang bersangkutan.

2. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas karya ilmiah yang didapatkan dengan cara melalui beberapa sumber, lalu menghasilkan kesepakatan dan meminta kesepakatan atas tiga (wawancara, observasi dan dokumentasi) sumber data. Triangulasi data digunakan untuk mencari data, bahwa data itu terpercayai. Informasi yang sama bisa diterima dari sumber yang berbeda.

3.6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis terhadap data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deduktif/induktif, yaitu dengan mendiskripsikan istilah-istilah yang ada pada judul dan penjelasan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken, yang dikutip oleh Lexy J. Moelong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisa data mengkombinasikan antara Teori Miles dan Huberman dan Teknik Analisa Data menggunakan Teori ASOCA.

Miles Hubberman menjelaskan, bahwa analisa data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan penabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data

dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian Data

Penyajian data (display data) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah - pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-katagori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded.

Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Teknik Analisa Data menggunakan Analisa ASOCA bermaksud untuk mengidentifikasi faktor-faktor sistematis dalam merumuskan strategi pemerintahan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kemampuan, kekuatan, peluang, budaya atau kebiasaan dan kecerdasan atau ketajaman berpikir (*agility*) secara keseluruhan dapat meminimalisir ancaman dan memenangkan persaingan dalam dunia bisnis.

Menurut Ermaya (2013: 18), ASOCA merupakan singkatan dari: *Ability* (Kemampuan), *Strength* (Kekuatan), *Opportunities* (Peluang), *Culture* (Budaya) dan *Agility* (Kecerdasan). Analisis ASOCA menambahkan unsur *Culture* (Budaya) dan *Agility* (Kecerdasan) sebagai unsur yang penting dalam menemukan strategi pemecahan masalah, pengambilan putusan dan dapat dikembangkan dalam mengikuti perubahan, perkembangan zaman dan kebutuhan. Sinergitas elemen-elemen ASOCA sangat penting dikelompokkan ke dalam lingkungan strategis internal dan eksternal yang dapat dibuat dalam bentuk matriks analisis ASOCA.

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti pemilihan lokasi atau *site selection* berkenaan

dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti.

Lokasi penelitian yang berjudul Strategi Intervensi Pemerintah Daerah dalam upaya Percepatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat adalah berlokasi di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, Kota Deltamas Cikarang Pusat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.

3.7.2. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian adalah serangkaian waktu dan kegiatan yang direncanakan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian, biasanya jadwal penelitian disajikan dalam bentuk daftar tabel yang menunjukkan tahapan secara lengkap mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan dengan keterangan waktu yang disertakan di dalamnya.

Jadwal Penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan mulai Bulan Agustus hingga Bulan Desember 2022. Adapun rincian proses rencana pengerjaan per minggunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Jadwal Penyusunan Penelitian Tesis Tahun 2022

No	Jenis Kegiatan	Agu st	Sept – Des	Jan Feb	Feb 23			Mar - Apr23			Mei - Jun 23			Juli- Ags 23			Sep-Oct 23		
		2022	2022	2022	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Sidang Proposal																		
2	Pengurusan Izin Penelitian																		
3	Penyusunan Instrumen Penelitian																		
4	Pengujicobaan Instrumen																		
5	Pengumpulan Data																		
6	Pengolahan dan Analisis Data																		
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																		
8	Penyajian Laporan Hasil Penelitian																		
9	Sidang tesis																		
10	Revisi Tesis																		
11	Wisuda																		

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian merupakan gambaran umum mengenai wilayah yang digunakan sebagai lokasi penelitian. Data deskripsi wilayah dalam penelitian ini sebagian besar diambil dari data monografi Kabupaten Bekasi tahun 2017 - 2022 dan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi tahun 2012.

1. Letak, Batas dan Luas Wilayah Kabupaten Bekasi

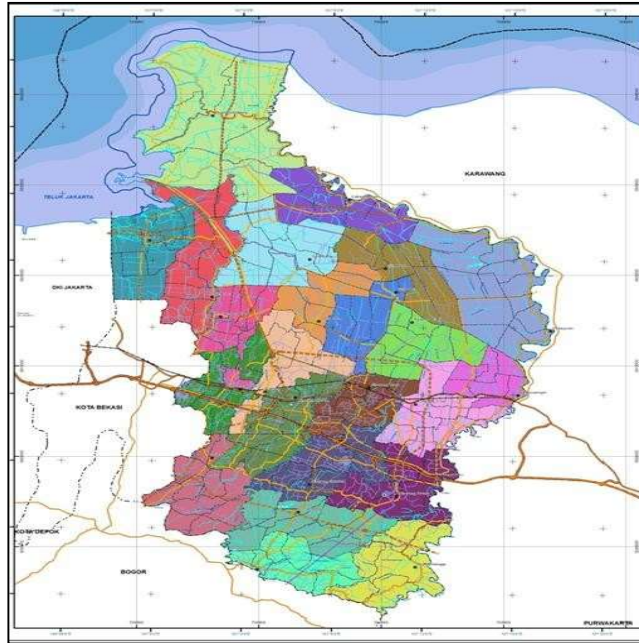
Secara geografis, Kabupaten Bekasi terletak pada posisi $6^{\circ}10'53''$ - $6^{\circ}30'6''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}48'28''$ - $107^{\circ}27'29''$ Bujur Timur. Kabupaten Bekasi memiliki wilayah seluas 1.273,88 km² yang terbagi ke dalam 23 kecamatan, 7 kelurahan (Bahagia, Kebalen, Wanasari, Telaga Asih, Sertajaya, Jatimulya, Kertasari) dan 180 desa. Secara administratif, Kabupaten Bekasi berbatasan dengan wilayah kabupaten/kota lainnya, antara lain sebagai berikut:

Utara	: Laut Jawa
Selatan	: Kabupaten Bogor
Barat	: Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi
Timur	: Kabupaten Karawang

Dari 23 kecamatan yang ada, kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Bekasi adalah Kecamatan Muaragembong dengan luas wilayah sebesar 140,09 km², dan terkecil yaitu Kecamatan Kedungwaringin dengan luas wilayah sebesar 31,53 km². Berikut disajikan peta administratif Kabupaten Bekasi :

Gambar 4.1.

Peta Administratif Kabupaten Bekasi



Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031

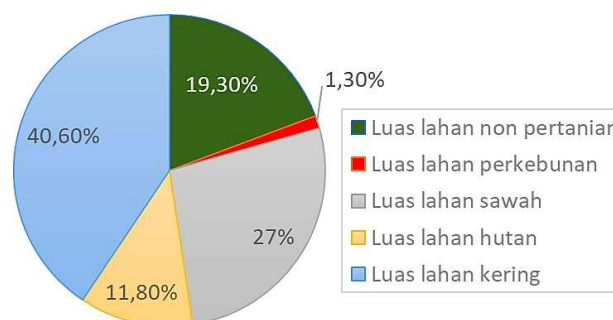
Topografi Kabupaten Bekasi terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah yang meliputi sebagian wilayah bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan dengan ketinggian lokasi antara 6-115 meter dan kemiringan 0-25°. Kecamatan dengan ketinggian wilayah tertinggi adalah Kecamatan Bojongmangu dengan ketinggian 95 mdpl, dan terendah Kecamatan Muaragembong dengan ketinggian 3 mdpl. Sedangkan untuk kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Muaragembong dan Cabangbungin, dan terdekat adalah Kecamatan Cikarang Pusat.

2. Tata Guna Lahan Kabupaten Bekasi

Untuk tahun 2020, penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 40,6% lahan kering, 27% lahan sawah, 19,3% lahan non pertanian, 11,8% lahan hutan, dan 1,3%. Di tahun ini terjadi perubahan luas penggunaan lahan, dimana luas permukiman dan perkebunan masing-masing meningkat sebesar 5,81% dan 2,14%. Di sisi lain, luas lahan perikanan dan sawah justru berkurang sebesar 11,92% dan 14,37%. Sedangkan lahan hutan di Kabupaten Bekasi pada tahun yang sama berdasarkan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat terdiri dari hutan rakyat seluas 915 Ha dan kawasan hutan negara seluas 9.666,91 Ha, yang terbagi kembali menjadi hutan lindung seluas 4.772,11 Ha dan hutan produksi terbatas seluas 4.894,81 Ha.

Gambar 4.2

**Persentase Luas Wilayah Kabupaten Bekasi Menurut Penggunaan Lahan
Utama Tahun 2020**



Sumber: <https://dataalam.menlhk.go.id/luaskawasan/2020/jawa-barat/kabupaten-bekasi>

3. Demografi Kabupaten Bekasi

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan, dari 3.246.013 jiwa ke angka 3.763.886

jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan di tahun 2020 dengan merebaknya Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Penurunan ini diperkirakan terjadi akibat arus penduduk keluar yang disebabkan oleh pekerja yang kembali ke kampung halamannya karena kebijakan *work from home* maupun PHK karena kondisi perusahaan yang tidak stabil atau gulung tikar, juga yang meninggal akibat terpapar Covid-19. Seiring dengan membaiknya perekonomian daerah di tahun 2021, penduduk di Kabupaten Bekasi kembali mengalami peningkatan dengan jumlah sebanyak 3.157.962 jiwa.

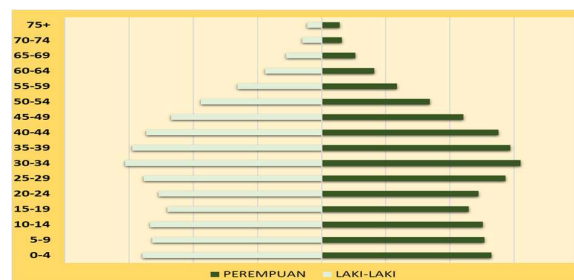
Penyebaran penduduk di Kabupaten Bekasi tidak merata dan cenderung menumpuk di wilayah yang berdekatan dengan industri dan Kota Bekasi yang lebih dahulu berkembang. Selain karena motif ekonomi, ketersediaan infrastruktur publik dan konektivitas wilayah merupakan penyebab wilayah-wilayah tersebut lebih diminati dibandingkan wilayah sepi penduduk yang sebagian besar didominasi oleh wilayah pertanian. Untuk tahun 2021, wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Tambun Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 430.565 jiwa dan kepadatan sebesar 9.990 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu dengan jumlah penduduk sebanyak 27.986 jiwa. Adapun kecamatan dengan kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Muaragembong dengan kepadatan 290 jiwa/km² akibat wilayahnya yang luas.

Dilihat dari proporsi antara penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bekasi untuk tahun 2021 adalah sebesar 103,14, turun dari angka 103,2 di tahun 2020. Rasio ini menunjukkan bahwa di setiap 100 orang penduduk wanita, terdapat 103 orang penduduk laki-laki atau secara

keseluruhan dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Bekasi lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Walaupun lebih besar, namun jumlah antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bekasi tidak terpaut terlalu jauh atau cukup seimbang. Sementara apabila dilihat dari kelompok usia, penduduk Kabupaten Bekasi didominasi oleh penduduk usia produktif dengan jumlah sebanyak 2.258.518 jiwa atau sebanyak 72% dan non produktif sebanyak 899.444 jiwa atau sebanyak 28% dengan rasio ketergantungan sebesar 39,82% atau setiap 100 orang usia produktif menanggung 39-40 orang usia non produktif. Banyaknya usia produktif tersebut dapat menjadi potensi bila dimanfaatkan secara optimal mengingat Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah industri masih membutuhkan banyak sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Namun di sisi lain, bila tidak termanfaatkan maka akan menjadi beban dalam pengangguran dan kemiskinan. Dengan rasio ketergantungan yang masih masuk ke dalam kategori rendah, penduduk usia produktif di Kabupaten Bekasi seyogyanya memiliki kesempatan yang lebih besar dalam upaya pengembangan dirinya untuk meningkatkan status ekonomi dan sosialnya di masyarakat

Gambar 4.3

Grafik Piramida Penduduk Kabupate Bekasi



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022

4. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bekasi

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031 meliputi:

- a. Rencana sistem perkotaan, yang terdiri atas: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); sert
- b. Sistem jaringan prasarana wilayah, yaitu rencana jaringan transportasi yang meliputi: rencana pengembangan sistem transportasi darat, jaringan perkeretaapian, serta prasarana transportasi laut.

Rencana pengembangan wilayah perkotaan Kabupaten Bekasi dibagi ke dalam 4 (empat) bagian, antara lain:

1. Wilayah Pengembangan (WP) I, yang diarahkan dengan fungsi utama pengembangan industri, perdagangan dan jasa, perumahan dan permukiman, pariwisata dan pendukung kegiatan industri, antara lain meliputi: Bekasi bagian tengah dengan pusat di perkotaan Tambun, serta wilayah pelayanan Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cikarang Timur, dan Cikarang Selatan.
2. Wilayah Pengembangan (WP) II, yang diarahkan dengan fungsi utama pengembangan pusat pemerintahan kabupaten, industri, perumahan dan permukiman skala besar, pertanian dan pariwisata, antara lain meliputi: Bekasi bagian selatan dengan pusat di perkotaan Sukamahi, serta wilayah pelayanan

Cikarang Pusat, Setu, Serang Baru, Cibusah, dan Bojongmangu

3. Wilayah Pengembangan (WP) III, yang diarahkan dengan fungsi utama pengembangan pertanian lahan basah, perumahan dan permukiman, antara lain meliputi: Bekasi bagian timur, dengan pusat di perkotaan Sukamulya, serta wilayah pelayanan Sukatani, Karangbahagia, Pebayuran, Sukakarya, Kedungwaringin, Tambelang, Sukawangi, dan Cabangbungin;
4. Wilayah Pengembangan (WP) IV, yang diarahkan dengan fungsi utama pengembangan wilayah, simpul transportasi laut dan udara, pertambangan, industri, perumahan dan permukiman, pertanian lahan basah dan pelestarian kawasan hutan lindung, antara lain meliputi: Bekasi bagian utara dengan pusat di perkotaan Pantai Makmur, serta wilayah pelayanan Tarumajaya, Muaragembong, Babelan, dan Tambun Utara.

Adapun pembagian pusat kegiatan dan pelayanan sistem perkotaan Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

1. PKN, yang meliputi: Kecamatan Setu dan Tambun Selatan.
2. PKL, yang meliputi: Kecamatan Cikarang Pusat, Tarumajaya, Cibusah, Sukatani, dan Cibitung.
3. PKLp, yang meliputi: Kecamatan Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cikarang Timur.
4. PPK, yang meliputi: Kecamatan Serang Baru, Bojongmangu, Kedungwaringin, Karangbahagia, Tambelang, Pebayuran, Babelan, Tambun Utara, Sukakarya, Cabangbungin, Muaragembong, Sukawangi.

Selain sistem perkotaan, juga direncanakan pengembangan sistem

perdesaan dalam bentuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yang meliputi: PPL Nagasari, Hegarmukti, Sukabungah, Cibarusah Kota, Serang, Sukaragam, Cibening, Tamansari, Tanjungbaru, Karang Satria, Bahagia, Pusaka Rakyat, Pantai Bahagia, Sindang Jaya, Sukamantri, Karanghaur, Karang Mukti, Karang Mekar, Sukatenang, Sukamulya.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan, perlu di ingatkan kembali kalau penelitian ini mengkombinasikan tehnik analisa data menggunakan teori Miles dan Hubberman dengan Teori Analisa ASOCA. Melalui Tehnik Analisa Data yang dilakukan oleh peneliti melalui tahapan sebagai berikut :

4.2.1 Reduksi Data

Dari penelitian kualitatif yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Peneliti menggali data primer melalui dokumen-dokumen perencanaan dan evaluasi, peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi (Permendagri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang perencanaan, pengelolaan keuangan dan dasar-dasar pelaksanaan APBD Kabupaten Bekasi), kemudian untuk mendapatkan data sekunder, peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam kepada 15 orang narasumber untuk mendapatkan isu aktual yang terjadi dalam pemecahan masalah terkait focus Percepatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bekasi. Kedua data tersebut, dipilah dan diambil poin-poin pentingnya untuk kemudian dituangkan kedalam isi hasil

penelitian.

Dalam melaksanakan Reduksi Data sebagai bagian dari Hasil Analisa Data, Peneliti menggunakan *Deep Interview* (Wawancara Mendalam) yang digunakan dalam penelitian. Adapun informan wawancara di dalam penelitian ini adalah Kepala Daerah (Penjabat Bupati Bekasi), Sekretaris Daerah, Pejabat-pejabat struktural dan fungsional pada Perangkat Daerah yang bersifat strategis, serta melibatkan unsur akademisi, insan media serta sampling beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang memiliki peran strategis dalam percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 15 (lima belas) orang yang digunakan sebagai sumber data primernya.

a. Informan Satu

Informan Satu adalah Dr. H. Dani Ramdan, MT, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga memegang jabatan Struktural Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.

Dani Ramdan dilantik sebagai Penjabat (PJ) Bupati Bekasi pada tanggal 23 Mei Tahun 2022 menggantikan Akhmad Marjuki yang berakhir masa jabatannya di tanggal 22 Mei 2022, Beliau dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32-1178 tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang pengangkatan Penjabat (PJ) Bupati Bekasi.

Di bawah kepemimpinan PJ Bupati Bekasi, Kabupaten Bekasi terbilang mengalami banyak *progress* atau kemajuan di bidang infrastruktur, pelayanan

publik dan tata kelola pemerintahan. Hal ini ditandai dengan banyaknya prestasi yang ditorehkan Kabupaten Bekasi dalam berbagai penilaian dan kompetisi baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Gebrakan dan inovasi baru muncul dibawah arahan PJ Bupati Bekasi DR. H. Dani Ramdan, MT, diantaranya program pengentasan pengangguran dan kemiskinan yang di realisasikan dengan membentuk Satuan Tugas Pengentasan Pengangguran dan Kemiskinan, salah satu capaiannya adalah membangun komitmen nota kesepahaman bersama 62 perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal (asli Bekasi), melalui kerjasama tersebut setidaknya ada 6000 lebih tenaga kerja lokal yang sudah dipekerjakan di sejumlah perusahaan ternama di Kabupaten Bekasi per bulan Agustus 2022. (*megapolitann.antaranews.com*, 2022).

b. Informan Dua

Informan kedua adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Drs, Dedy Supriyadi, MM. yang dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi pada tanggal 31 Januari 2023 oleh Plt. Bupati Bekasi saat itu, H. Akhmad Marjuki menggantikan Penjabat Sekretaris Daerah sebelumnya yaitu Drs. H. Herman Hanapi, M.Si.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Daerah, Drs. Dedy Supriyadi, MM memegang jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, dan telah mengikuti proses Assestment / Open Bidding seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah yang memakan waktu kurang lebih 1 Tahun.

c. Informan Ketiga

Informan ketiga adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, H. Entah Ismanto, SH, MM yang dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi menggantikan posisi Drs. Dedy Supriadi MM yang telah dilantik menjadi Sekretaris Daerah.

H. Entah Ismanto, merupakan putra daerah, orang Bekasi Asli yang memiliki jaringan luas ke masyarakat, latar belakang keilmuan yang bersifat teknis serta pengalaman menjabat di beberapa Jabatan Struktural menjadi modal utama beliau dalam memimpin Perangkat Daerah yang berperan menjalankan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah.

d. Informan Keempat

Informan Ke-empat yaitu H. M. BN Holik Qodratullah, SE, M.Si yang merupakan politisi Partai GERINDRA yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode Tahun 2019-2024 menggantikan Aria Dwi Nugraha melalui pengucapan sumpah dan janji jabatan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 lalu.

e. Informan Kelima

Informan Kelima yaitu Dr. Iis Sandra Yanti, S.STP, M.IP yang merupakan ASN Kabupaten Bekasi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

f. Informan Keenam

Informan Keenam yaitu Dr. Harun Al Rasyid yang merupakan salah satu anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi yang dibentuk oleh PJ Bupati Bekasi Dr. H. Dani Ramdan, MT. Harun Al Rasyid juga menjabat sebagai Wakil Rektor IV pada Universitas Islam 45 Bekasi, peran beliau di Kabupaten Bekasi cukup berpengaruh karena banyak perangkat daerah yang menggunakan keahliannya sebagai tenaga ahli / narasumber dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah.

g. Informan Keenam

Informan Ketujuh yaitu Dwy Sigit Andrian, S.STP, M.IP yang merupakan ASN Kabupaten Bekasi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi.

h. Informan Kedelapan

Informan Kedelapan yaitu Epi Nurdin, SH, beliau merupakan ASN Kabupaten Bekasi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

i. Informan Kesembilan

Informan Kesembilan yaitu Agus Budiono, S.STP, MTr.IP yang merupakan ASN Kabupaten Bekasi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Bekasi.

j. Informan Kesepuluh

Informan Kesepuluh yaitu DR. Harun Al Rasyid yang merupakan Anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi

yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor IV Universitas Islam 45 Bekasi.

k. Informan Kesebelas

Informan Kesebelas yaitu Evi Mutia Sofa, ST, MT yang merupakan ASN Kabupaten Bekasi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Kabupaten Bekasi.

l. Informan kedua belas

Informan Kedua Belas yaitu Zulfiah, SE, MM yang merupakan ASN Kabupaten Bekasi yang saat ini menjabat sebagai Fungsional Perencana dan Sub Koordinator Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Bekasi

m. Informan Ketiga belas

Informan Ketiga Belas yaitu Fuad Hasan, S.SIT yang merupakan ASN Kabupaten Bekasi yang saat ini menjabat sebagai Fungsional Perencana dan Sub Koordinator Infrastruktur Wilayah pada Bappeda Kabupaten Bekasi.

n. Informan ke Empat Belas

Informan Ke Empat Belas yaitu Asep Nazmudin, SE yang merupakan ASN Kabupaten Bekasi yang saat ini menjabat sebagai Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bappeda Kabupaten Bekasi.

o. Informan Kelima belas

Informan Kelima Belas yaitu Fauzi yang merupakan Insan Media atau wartawan yang saat ini bertugas pada Media Center Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistika Kabupaten Bekasi.

Dalam upaya menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang optimal.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian bagaimana Strategi Exisiting (Strategi yang saat ini dilaksanakan) oleh Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi, peneliti menggunakan pendekatan Evaluasi Semu dalam teori evaluasi kebijakan (William N Dunn, Analisis Kebijakan Publik, 2000).

Pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini memasuki periode tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017 – 2022. Dalam perjalanan nya terjadi beberapa kali pergantian Kepala Daerah. Di Tahun 2018 terkait kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya, Bupati Bekasi pada masa itu dr. H. Neneng Hasanah Yasin dicopot dari jabatannya dan menjalani hukuman penjara, kemudian kursi jabatan Bupati Bekasi digantikan oleh Wakilnya, H. Eka Supria Atmaja selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Seiring waktu berjalan, pandemi *Covid-19* yang melanda hampir di seluruh penjuru dunia, mengakibatkan Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja sakit terpapar penyakit tersebut dan akhirnya wafat di Tahun 2020.

Tahun 2020 kursi kepemimpinan Bupati Bekasi sementara di jabat oleh Penjabat Bupati Bekasi yang juga merupakan Plt. Sekretaris Daerah yang ditunjuk waktu itu yaitu Drs. H. Herman Hanapi, kemudian hasil dari keputusan DPRD Kabupaten Bekasi yang tertunnda menunjuk H. Ahmad Marjuki yang dilantik

menjadi Wakil Bupati Definitif akhirnya dilantik juga menjadi Plt. Bupati Bekasi.

Terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu serentak di Tahun 2024 maka, pada Tahun 2021 Plt. Bupati Bekasi H. Akhmad Marjuki memasuki masa akhir jabatannya dan dilanjutkan oleh Penjabat Bupati Bekasi Dr. H Dani Ramdan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan dilantik oleh Gubernur Jawa Barat secara resmi memegang pimpinan tertinggi sebagai Penjabat Bupati Bekasi sampai saat ini

Kebijakan demi kebijakan dari tahun ke tahun telah menghasilkan beberapa hasil pembangunan yang cukup memuaskan, namun di penghujung periode tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 tersebut, banyak indikator pembangunan yang tidak tercapai, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tidak mencapai target, angka kemiskinan yang masih tinggi, serta tingkat pengangguran yang juga masih tinggi.

4.2.2. Penyajian Data Percepatan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

Melalui penelitian yang dilaksanakan, telah didapatkan data untuk menggambarkan kondisi dan strategi eksisting (yang telah dilakukan) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, pertama yang harus diketahui adalah bagaimana sasaran daerah di Kabupaten Bekasi dan bagaimana usaha pencapaiannya.

Adapun Sasaran Daerah merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil dilaksanakan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, Kabupaten Bekasi mempunyai sasaran daerah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab sulitnya masyarakat miskin untuk keluar dari siklus kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut telah menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu bersaing dalam upaya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga pada akhirnya masyarakat miskin tidak dapat keluar dari siklus kemiskinan. Oleh sebab itu, dalam rangka menurunkan kemiskinan dan mencegah timbulnya masyarakat miskin baru, maka intervensi utama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan manusia.
2. Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja Besarnya angkatan kerja di Kabupaten Bekasi dimana tidak semua pencari kerja memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang memenuhi standar perusahaan sementara lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas menyebabkan tingkat persaingan semakin tinggi. Dengan kemudahan akses transportasi dan komunikasi saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya angkatan kerja di Kabupaten Bekasi tidak hanya bersaing dengan angkatan kerja dari daerah lain saja, melainkan juga akan bersaing dengan angkatan kerja yang berasal dari luar negeri, terutama pada sektor-sektor yang pekerjaannya dapat dilakukan dari rumah. karenanya, diperlukan adanya intervensi untuk mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru serta penyiapan angkatan kerja

agar dapat berdaya saing dalam pencarian kerja

3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dalam mendorong perekonomian daerah diperlukan mengingat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun. Peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta kepada pemerintah yang pada akhirnya dapat mendorong masuknya investasi serta pembukaan bisnis baru dan usaha di Kabupaten Bekasi.
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah Faktor lainnya yang dapat diintervensi oleh pemerintah daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur dan konektivitas wilayah. Pengeluaran pemerintah yang besar di infrastruktur pelayanan publik dapat meningkatkan nilai PDRB kabupaten. Sementara konektivitas antarwilayah yang baik akan memudahkan akses barang dan jasa, yang dapat menurunkan biaya transportasi serta menurunkan biaya operasional keseluruhan sehingga akan menarik investasi dan bisnis untuk masuk dan berkembang.
5. Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi Kondisi lainnya yang diperlukan untuk mendorong perkembangan bisnis dan usaha adalah kondusivitas wilayah. Bencana atau kerusakan yang terjadi tiap hari tentunya akan menghalangi jalannya bisnis dan usaha masyarakat. Kebijakan pembatasan yang ketat selama 2 tahun terakhir telah membuktikan bagaimana

banyak perusahaan dan bisnis yang gulung tikar akibat omset yang diterima perusahaan tidak dapat menutupi biaya operasional yang besar dengan menurunnya produktivitas serta permintaan konsumen. Oleh karenanya, kondusivitas wilayah sangat diperlukan untuk menciptakan stabilisasi ekonomi agar dapat mendorong perekonomian untuk tumbuh lebih cepat.

6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Dalam menunjang perekonomian daerah, faktor penunjang lain yang tidak kalah penting adalah kualitas lingkungan hidup. Dengan semakin padatnya penduduk serta banyaknya aktivitas, kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Apalagi orientasi yang cenderung kepada profit seringkali melupakan dampaknya terhadap lingkungan sehingga diperlukan adanya intervensi pemerintah agar kualitas lingkungan hidup tidak semakin merosot di masa yang akan datang. Degradasi kualitas lingkungan hidup pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya bencana baru yang akan mempengaruhi kondusivitas wilayah. Selain itu dengan kualitas lingkungan hidup yang baik, masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonominya dengan nyaman yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan. Daya dukung lingkungan juga dibutuhkan untuk usaha dalam skala besar. Untuk itu, kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mendukung upaya mewujudkan kondusivitas wilayah

Adapun strategi yang saat ini dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai Sasaran Daerah di Kabupaten Bekasi dapat dikembangkan melalui analisa sebagai berikut :

Pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi sebenarnya sudah cukup baik dan berkembang pesat, terutama dalam bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, hal ini ditandai dengan sudah terbangunnya infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah, seperti jalan tol, jembatan, jalan penghubung antar kawasan industri, jalan penghubung antar kecamatan dan flyover.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh informan ketujuh, Fuad Hasan, S.STP yang menjabat sebagai Subkoordinator Infrastruktur di Bappeda sebagai berikut :

“Kabupaten Bekasi yang memiliki luas wilayah sebesar 1.273,88 km², mulai maju dalam pembangunan infrastruktur wilayah, sudah ada Jalan Tol Gabus (Cibitung – Marunda) yang mempermudah pengangkutan logistik dari tol cikampek ke pelabuhan Tanjung Priok melalui Marunda. Tentunya hal ini akan meningkatkan juga perekonomian masyarakat di sekitar pintu keluar tol tersebut jika bisa memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu di beberapa tahun ke belakang sudah dibangun juga Flyover dan Underpass untuk mengatasi kemacetan, jalan penghubung antar desa dan kecamatan setiap tahun juga dibangun”

Pembangunan terus dilakukan di Kabupaten Bekasi mengikuti kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui metode *bottom-up* lewat forum Musrenbang Desa – Kecamatan – Kabupaten – Provinsi hingga Nasional. Keuntungan lain yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi adalah memiliki Kawasan Industri terbesar se-Asia Tenggara yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi, namun mengingat alat transportasi yang digunakan adalah Truk Container berskala berat dan panjang, maka beban yang harus di terima oleh jalan-jalan di Kabupaten Bekasi kadang melebihi dari yang seharusnya, sehingga banyak terjadi jalan rusak di beberapa ruas jalan, hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk menganggarkan biaya pemeliharaan jalan, dan bekerja sama dengan kawasan industri yang ada untuk membuka jalan antar kawasan

sehingga memudahkan mobilitas transportasi pengangkut untuk sampai pada tujuan karena lebih dekat untuk mengakses jalan tol.

Gambaran umum pembangunan di Kabupaten Bekasi berkembang secara pesat, hal ini sesuai dengann pernyataan Informan Kedelapan, Ibu Zulfiah yang merupakan Subkoordinator Pembangunan Manusia pada Bappeda.

“Beliau mengatakan “Menurut saya Kabupaten Bekasi mengalami kemajuan pesat dalam infrastruktur dan industry, namun saya tidak bisa mengatakan puas atau tidak puas terhadap kemajuan di Kabupaten Bekasi, hanya bisa berharap Kabupaten Bekasi untuk bisa terus melakukan evaluasi dan mencari cara untuk meningkatkann pembangunan secara berkelanjutan dan inklusif sehingga memberikan manfaat yang lebih besar”.

Zulfiah juga menjelaskan “Strategi yang saat ini dilaksanakan Kabupaten Bekasi saat ini adalah Peningkatan Investasi / Penanaman Modal baik Asing maupun Lokal, Peningkatan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Peningkatan Kualitas Kesehatan”

Dari kedua informan tadi, didapatkan bahwa kenyataannya pembangunan di Kabupaten Bekasi sudah cukup maju dan pesat, dan strategi percepatan pembangunan yang dilakukan saat ini adalah melalui percepatan pembangunan infrastruktur kewilayahan, dengan terbangunnya infrastruktur kewilayahan di wilayah Kabupaten Bekasi, maka konektivitas antar wilayah akan tercapai dan ekonomi masyarakat akan semakin meningkat.

Selain itu didapat bahwa strategi eksisting (yang dilaksanakan) pemerintah daerah Kabupaten Bekasi saaat ini dalam upaya percepatan pembangunan adalah:

1. Peningkatan Investasi / Penanaman Modal baik Asing maupun Lokal
2. Peningkatan Infrastruktur

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Dalam pencapaian target-target indikator makro, terdapat beberapa indikator yang memberikan signifikansi penting terhadap keberhasilan pembangunan, adapun indikator dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Angka Kemiskinan

Pertama, kita akan membahas tentang Angka Kemiskinan di Kabupaten Bekasi. Garis kemiskinan di Kabupaten Bekasi terus mengalami peningkatan dari sebesar Rp.434.112/kapita/bulan menjadi Rp.549.875/kapita per bulan dengan terus meningkatnya harga komoditi makanan. Sementara indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang telah menurun di tahun 2019 kembali meningkat di tahun 2020 akibat menurunnya perekonomian daerah yang disebabkan oleh Covid-19.

Hal ini dapat dilihat melalui grafik time series (2017-2021) perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Bekasi sebagai berikut :

Gambar 4.4.

Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bekasi



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Semakin tinggi pendapatan rumah tangga, pengeluaran untuk produk makanan semakin menurun, atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan sebuah rumah tangga, maka pengeluaran untuk konsumsi makanan akan semakin menurun dan pengeluaran untuk konsumsi non makanan akan semakin meningkat.

Selama tahun 2019-2021 pengeluaran per kapita sebulan masyarakat Kabupaten Bekasi yang dipisahkan menjadi kelompok makanan dan bukan makanan berfluktuasi. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan adalah sebesar 49,42%, jumlahnya meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 52,79% untuk turun kembali menjadi 50,37% di tahun 2021. Sementara pengeluaran untuk kelompok non makanan adalah sebesar 50,58% di tahun 2019, turun menjadi 47,21% di tahun 2020 akibat meningkatnya pengeluaran untuk makanan, dan naik kembali menjadi 49,63% di tahun 2021 dengan menurunnya pengeluaran untuk makanan. Berdasarkan proporsi pengeluaran per kapita sebulan masyarakat untuk makanan dan bukan makanan yang hampir seimbang dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bekasi berada pada kelompok menengah.

Bila dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita seminggu menurut kelompok makanan di Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021, terjadi perubahan pola konsumsi makanan akibat di tahun 2020 yang kemungkinan disebabkan oleh Covid-19. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan konsumsi untuk makanan dan minuman jadi, rokok dan tembakau, sayur-sayuran, telur

dan susu, bahan minuman, serta bahan makanan lainnya. Sedangkan di tahun berikutnya, kecuali sayur-sayuran, bahan minuman dan bahan makanan lainnya, seluruhnya kembali mengalami penurunan di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat berubah ketika Covid-19 melanda, yakni masyarakat lebih menyukai makanan dan minuman jadi yang lebih murah dan mudah didapat serta rokok dan tembakau, yang kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan pendapatan masyarakat

Tabel 4.1
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Seminggu menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021 (Rupiah/Kapita/Minggu)

No.	Kelompok Komoditas	2018	2019	2020	2021
1.	Makanan dan Minuman Jadi	71.735	75.366	85.936	71.740
2.	Rokok dan Tembakau	17.642	17.617	20.589	19.203
3.	Sayur-Sayuran	10.685	11.838	11.941	17.126
4.	Padi-Padian	14.627	15.283	14.355	15.663
5.	Ikan	9.241	13.236	10.612	12.717
6.	Telur dan Susu	8.549	12.015	12.084	11.010
7.	Buah-Buahan	7.652	7.966	8.258	7.380
8.	Daging	6.149	8.157	6.808	6.971
9.	Bahan Minuman (Gula, Teh, Kopi dan Lainnya)	3.843	4.106	4.179	4.899
10.	Bahan Makanan Lainnya	2.615	2.989	3.451	4.199
11.	Bumbu-Bumbuan	2.763	2.967	2.963	4.109
12.	Minyak dan Kelapa	2.760	3.258	3.082	3.905
13.	Kacang-Kacangan	3.109	3.181	2.965	3.655
14.	Umbi-Umbian	942	1.364	926	1.392

Sumber: <https://www.bps.go.id>

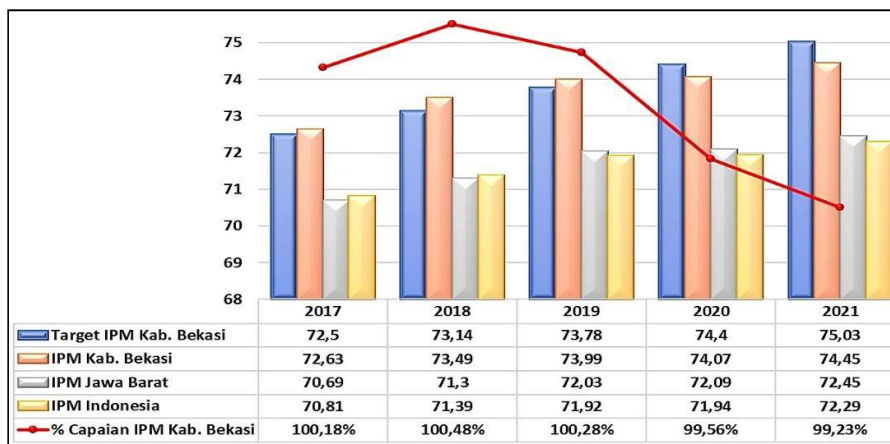
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2021 menunjukkan angka yang terus meningkat, yaitu dari 72,63 di tahun 2017 menjadi sebesar 74,45 di tahun 2021. Dibandingkan dengan IPM Jawa Barat dan Indonesia, nilai IPM Kabupaten Bekasi selama kurun waktu

tersebut juga berada di atas Jawa Barat dan Indonesia. Meskipun perekonomian daerah melambat di tahun 2020 akibat Covid-19, namun pembangunan manusia di Kabupaten Bekasi masih tetap berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat melalui nilai IPM Kabupaten Bekasi yang tetap meningkat ke angka 74,07 di tahun 2020, dari sebelumnya sebesar 73,99 di tahun 2019. Meski secara capaian terhadap target menurun akibat Covid-19, nilai IPM Kabupaten Bekasi masih tetap berada di atas nilai IPM Jawa Barat dan nasional selama tahun 2020 dan 2021, dimana nilai IPM Jawa Barat pada tahun tersebut adalah sebesar 72,09 dan 72,45, serta Indonesia sebesar 71,94 dan 72,29.

Hal ini tersaji dalam grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bekasi, IPM Provinsi Jawa Barat dan IPM Nasional sebagai berikut :

Gambar 4.5
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Bekasi
Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2017-2021

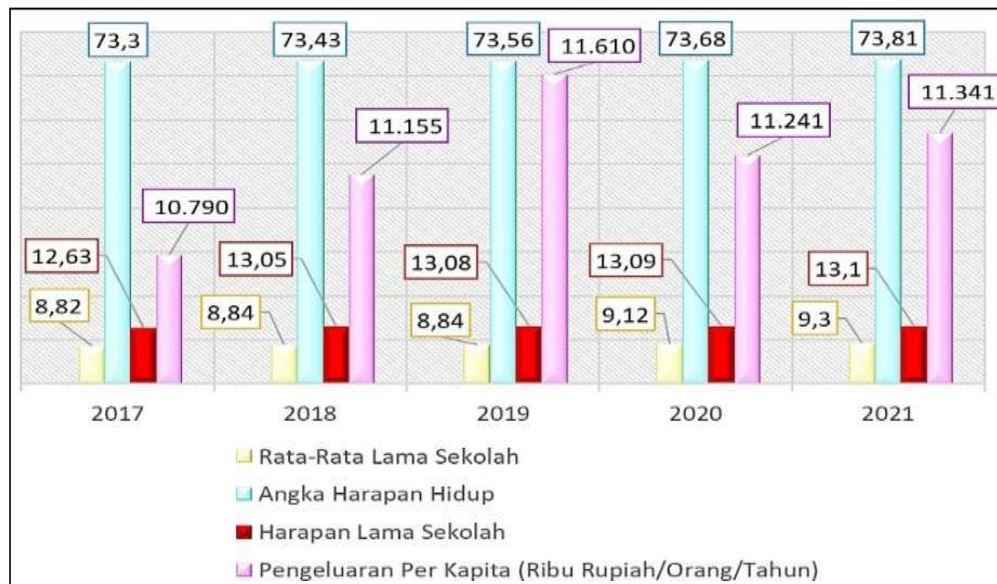


Sumber: RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 dan BPS, diolah

Dari seluruh komponen IPM, komponen yang mengalami penurunan di tahun 2020 adalah pengeluaran per kapita masyarakat, yang menurun dari Rp. 11.610.000,-/ orang / tahun menjadi Rp.11.241.000,-/orang/tahun dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah akibat Covid-19, sementara yang

lainnya tetap mengalami peningkatan meski di tengah kondisi Covid-19. Dengan semakin membaiknya ekonomi daerah di tahun 2021, seluruh komponen IPM kembali meningkat, termasuk pengeluaran per kapita masyarakat yang naik sebesar Rp.100.000/orang/tahun.

Gambar 4.6
Komponen IPM Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Sementara itu, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, RLS merupakan satu-satunya komponen IPM yang tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan meski nilainya terus mengalami peningkatan. Sedangkan pada HLS, capaiannya mengalami penurunan sejak tahun 2019 meski secara nilai juga terus mengalami kenaikan. Tidak mampu tercapainya kedua komponen IPM tersebut disebabkan oleh masih adanya siswa yang putus sekolah akibat kemiskinan maupun faktor lainnya. Sementara posisi Kabupaten Bekasi yang dekat dengan DKI Jakarta dan

kabupaten/kota besar lainnya seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bogor dan Karawang telah membantu Kabupaten Bekasi dalam memenuhi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Kawasan industri yang besar juga telah membantu perekonomian masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja dan usaha sehingga target indikator makro yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik meski belum seluruhnya optimal.

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Komponen IPM Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) - Tahun					
	TARGET RPJMD	9,01	9,2	9,39	9,58	9,78
	REALISASI	8,82	8,84	8,84	9,12	9,3
	% CAPAIAN	97,89	96,09	94,14	95,20	95,09
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS) - Tahun					
	TARGET RPJMD	12,52	12,8	13,09	13,93	13,65
	REALISASI	12,63	13,05	13,08	13,09	13,1
	% CAPAIAN	100,88	101,95	99,92	93,97	95,97
3.	Angka Harapan Hidup (AHH) - Tahun					
	TARGET RPJMD	73,29	73,34	73,39	73,54	73,49
	REALISASI	73,30	73,43	73,56	73,68	73,81
	% CAPAIAN	100,01	100,12	100,23	100,19	100,44
4.	Pengeluaran per Kapita per Tahun (dalam ribu rupiah)					
	TARGET RPJMD	10.532,76	10.790	10.719	10.812,09	10.905

Sumber: RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 dan BPS, diolah

Strategi lainnya yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi adalah melalui optimalisasi Tanggungjawab Lingkungan Sosial Perusahaan (TJSLP) atau CSR (*Coorporate Social Responsibility*), CSR.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan ibukota, fungsinya dalam menopang daerah Ibukota juga di dukung dengan keberadaan banyak perusahaan yang mendirikan pusat produksi dan distribusinya di Kawasan Industri yang ada di Kabupaten Bekasi, hal ini berdampak pada pertumbuhan penduduk yang bertambah tiap tahunnya, banyaknya pendatang dari berbagai daerah untuk mencari lapangan pekerjaan di Industri dan sektor lain, hal ini yang membuat semakin tinggi angka pengangguran tiap tahunnya. Akan tetapi di sisi lain, dengan banyaknya perusahaan di Kawasan Industri yang menjalankan usahanya di Kabupaten Bekasi menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi besar di Indonesia.

Berdasarkan metode observasi yang peneliti lakukan, pembangunan di Kabupaten Bekasi sebenarnya bisa berkembang pesat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun ada beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan tersebut dilaksanakan tepat pada sasaran, diantaranya :

- a. Ketegasan dan Kecakapan Kepala Daerah
- b. Integritas Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan program kegiatan
- c. Perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran berdasarkan data

- d. Keterlibatan unsur-unsur pentahelix dalam membangun daerah (Kabupaten Bekasi)
- e. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan yang ketat dari Instansi terkait dibawah koordinnasi Kepala Daerah

Berdasarkan penjelasan dari Informan Satu PJ Bupati Kabupaten Bekasi, Dr.

H. Dani Ramdan, MT, mengatakan :

“Era Kepemimpinan saya yang masuk pada tengah tahun anggaran 2022 belum dapat berjalan optimal, dan hanya menggunakan anggaran yang tersedia. Ditinjau dari stratagi intervensi yang diterapkan dalam tahun berjalan, pemerintah Kabupaten Bekasi lebih berfokus pada penguatan implementasi dan pengendalian. Dalam hal ini, implementasi tersebut dijalankan ragam agenda kegiatan, salah satunya adalah Rapat Pimpinan (Rapim) mingguan yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan sistem kendali atas kinerja dari seluruh pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi, baik dari sisi struktural maupun fungsional. Hal tersebut terkait dengan penyampaian progres mingguan target sasaran yang meliputi target input (penyerapan anggaran) dan output (hasil penggunaan anggaran), apakah sudah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.”

Melalui kegiatan Rapim mingguan, Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat mengidentifikasi bersama terkait aspek-aspek yang telah berjalan sesuai dengan rencana (on the track), ataupun aspek yang mengalami kendala maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Sehingga dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat memberikan atensi khusus dan strategi penguatan yang langsung fokus kepada titik hambatan tersebut, dengan memfokuskan pada strategi penggunaan anggaran dan juga kinerja dari pelaksananya sebagai sebuah langkah percepatan.

Melalui data yang diperoleh lewat beberapa link media sosial Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi yang di dalam penelitian ini merupakan Informan Kedua menegaskan bahwa situasi pemerintahan yang di pimpin oleh Bapak Pj Bupati Bekasi dimulai pada tengah tahun, sehingga

menciptakan kondisi dimana roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan hanya mampu menggunakan anggaran kas yang tersedia di tahun berjalan. Namun demikian, pada tahun berjalan tersebut terdapat momen perubahan anggaran, hal ini menjadi peluang bagi Bapak PJ Bupati Bekasi untuk berfokus pada strategi penajaman anggaran pada aspek-aspek tertentu yang sekiranya dapat lebih dioptimalkan, seperti masalah perbaikan infrastruktur jalan, hingga masalah sosial ekonomi yaitu pengangguran dan kemiskinan.

Lanjutnya Sekretaris Daerah Drs. Dedy Supriyadi, M.Si melalui beberapa berita online di akun media sosial Prokopim Kabupaten Bekasi mengatakan :

“Salah satu contoh optimalisasi dan penajaman anggaran yang telah dilaksanakan adalah adanya instruksi terkait Perlindungan Sosial (Perlinsos). Perlinsos merupakan salah satu klaster dari Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang dirancang untuk menjaga masyarakat yang terdampak secara ekonomi agar dapat terus memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebijakan perlinsos merupakan upaya untuk membantu kelompok terdampak menghadapi penurunan penghasilan atau kehilangan pekerjaan. Lewat kebijakan perlinsos, masyarakat yang terdampak ekonominya diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan terhindar dari risiko akibat kesenjangan yang lebih dalam (<https://djpb.kemenkeu.go.id>). Dalam intruksi Perlinsos di tahun 2022, setiap pemerintah daerah (Pemda) wajib mengalokasikan dana sebesar 2% yang diambil dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk anggaran belanja Perlindungan Sosial. Instruksi ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Adanya instruksi Perlinsos dari Pemerintah Pusat mengarahkan Pj Bupati Bekasi untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan dana tersebut bagi kepentingan kegiatan perlindungan sosial. Dalam konteks situasi pemulihan ekonomi masyarakat yang tidak stabil pasca Pandemi Covid-19, penggunaan anggaran banyak berfokus pada kegiatan padat karya dan subsidi yang difokuskan kepada target sasaran kepada kelompok masyarakat rentan, seperti buruh, nelayan,

dan lainnya PJ Bupati Bekasi berpandangan, hal inilah yang kemudian menjadi hal yang dirasa cukup berhasil mendongkrak indikator-indikator keberhasilan dalam percepatan pembangunan.

Pencapaian indikator keberhasilan yang dilaksanakan Bapak Dani Ramdan selama menjabat sebagai PJ Bupati Kabupaten Bekasi tidak selalu berjalan dengan mudah. Ditinjau dari sisi hambatan dan juga tantangan, terdapat sejumlah faktor yang perlu menjadi perhatian dalam menciptakan kultur organisasi yang sesuai dan selaras dalam menciptakan kinerja yang optimal. PJ Bupati Bekasi berpandangan, hal ini tidak terlepas dari segenap momentum yang terjadi dalam sepanjang perjalanan pemerintahan Kabupaten Bekasi yang telah beberapa kali berganti kepemimpinan. Tercatat bahwa pergantian kepemimpinan telah terjadi sebanyak lima kali. Hal ini juga bertemu dengan momentum pandemi Covid-19 yang menciptakan banyak ketidakstabilan dalam segala aspek dan dimensi, termasuk dimensi internal di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi sendiri. Oleh karena itu, ditinjau dari sisi kultur organisasi ada terkait gaya kepemimpinan dan juga “sikap mental” dari para pejabat dan aparatur terlibat. Situasi-situasi semacam ini menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat penyelarasan untuk menjawab tantangan dan pemenuhan target pemerintah.

4.2.3. Verifikasi Data Faktor Pendukung dan Penghambat Percepatan Pembangunan

Kabupaten Bekasi merupakan daerah di Provinsi Jawa Barat yang sebenarnya memiliki banyak potensi di segala bidang, diantaranya Potensi Perekonomian dan Potensi SDM (Sumber Daya Manusia), potensi-potensi tersebut harus

dimanfaatkan sebagai peluang dan kekuatan bagi Kepala Daerah yang memimpin Kabupaten Bekasi. Kecakapan dalam berkolaborasi dengan sektor swasta dalam melibatkan perusahaan-perusahaan di dalam pembangunan dampaknya tentu akan memberi manfaat yang luas bagi kesejahteraan di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut sudah dilakukan dalam berbagai program TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan) / CSR (*Coorporate Social Responsibility*) yang telah banyak membantu Kabupaten Bekasi dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan di masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Informan Pertama (PJ Bupati Bekasi) dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut :

“Salah satu peluang yang juga menjadi kekuatan daerah Kabupaten Bekasi adalah kehadiran industri-industri. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Bekasi merupakan daerah industri yang melibatkan banyak pelaku bisnis. Dalam kacamata pemerintahan, hal ini membawa peluang yang cukup menguntungkan dari ragam aspek. Ditinjau dari sisi pemasukan daerah, adanya industri juga mendatangkan sumber dana pajak yang dapat dimanfaatkan oleh daerah. Sementara dari sisi ekonomi bagi masyarakat, kehadiran industri baik dari saluran CSR maupun yang lain dapat menyerap tenaga kerja dan juga memberikan pembekalan kompetensi dan juga kemandirian bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah menilai bahwa hubungan baik dengan ragam industri ini menjadi salah satu peluang yang perlu tetap terjaga”.

TJSLP atau CSR sudah berjalan cukup baik namun belum optimal pelaksanaannya di Kabupaten Bekasi, dari data yang didapat, terdapat 7.339 perusahaan yang menjalankan usaha nya di Kabupaten Bekasi, diantaranya ada 48 perusahaan yang aktif berpartisipasi dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat dan memberikan laporannya kepada Pemerintah Daerah sebagai Tim Fasilitasi TJSLP, namun hal ini dirasa belum optimal, karena jumlah partisipan

dari TJSLP tersebut terbilang masih sangat sedikit dan yang dilakukan oleh perusahaan hanya sebatas bantuan-bantuan sosial saja, padahal perusahaan dapat juga dilibatkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sarana prasarana kemasyarakatan lainnya seperti, taman, sekolah, rehabilitasi pasar dan sebagainya. Fenomena ini sangat disayangkan karena Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang memiliki Kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara, namun jumlah perusahaan yang berperan serta dalam CSR sangat sedikit.

Hal ini didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Informan Keempat yaitu Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah, SE, M.Si. beliau mengatakan :

“Selain dari sisi kultur organisasi, hal lain yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Bekasi juga terkait aspek optimalisasi Pelaksanaan CSR di Kabupaten Bekasi, Setiap tahunnya Pemerintah Daerah melaksanakan yang namanya Musrenbang dari Tingkat Desa – Kecamatan – Kabupaten hingga ke Tingkat Nasional, jika ditelaah semua usulan pembangunan yang diajukan terbilan penting, dan perlu di akomodir, tapi semua itu mentok ke keterbatasan APBD kita (Kabupaten Bekasi) yang saat ini hanya berkisar 6 Trilyun Rupiah lebih, jika dijumlahkan seluruh usulan tersebut besaran biayanya dibutuhkan 40 Trilyun Rupiah, maka jika hanya bergantung pada APBD saja, Pembangunan kita akan terus kurang, harus dicari solusi dan pendanaan yang bersifat inovatif melibatkan sektor swasta (Industri), ini bisa dilakukan melalui CSR.”

Optimalisasi pelaksanaan CSR dan penajaman pelaksanaan anggaran dapat disimpulkan sebagai salah satu strategi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya Percepatan Pembangunan Daerah. Berdasarkan pandangan dari PJ Bupati Bekasi, pengalokasian anggaran yang ada sebelumnya masih belum dapat dikatakan sepenuhnya tepat sasaran. Dalam artian, masih ada program kegiatan yang seharusnya mendapatkan fokus alokasi anggaran jika ditinjau dari sisi urgensinya, justru belum bisa mendapatkan anggaran sebagaimana kebutuhan.

Sebaliknya, masih terdapat kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak terlalu urgen dari sisi substansi justru mendapatkan anggaran dana yang terlampau besar. Sehingga dapat ditinjau berdasarkan dari penjelasan PJ Bupati Kabupaten Bekasi tersebut, permasalahan anggaran lebih merujuk pada belum tercapainya pemrioritasan yang optimal dari sisi kebutuhan dan urgensi dari program kegiatan yang ada.

Tantangan lain yang juga cukup krusial juga berasal dari faktor eksternal, yaitu masyarakat itu sendiri. Sebagaimana pernyataan dari PJ Bupati Bekasi, beliau mengatakan

“Situasi di Kabupaten Bekasi memperlihatkan kecenderungan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Untuk menjawab tantangan ini, saya melakukan upaya pemulihan kepercayaan masyarakat melalui transparansi kegiatan dan juga anggaran yang telah ataupun yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki informasi terkait progres kinerja dari pemerintah dan masyarakat dapat melakukan penilaian dan perlahan menaikkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah”.

Proses transparansi berjalan dengan memanfaatkan saluran-saluran media yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi, seperti sosial media ataupun situs website, serta bersinergi dengan dinas-dinas terkait di tingkat kecamatan, kelurahan dan juga desa. Upaya ini dilaksanakan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi hingga ke tingkat yang lebih kecil. Transparansi tidak hanya berfokus pada keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, namun juga progres yang sedang berjalan. Sehingga, sekalipun target-target belum tercapai, pemerintah Kabupaten Bekasi tetap mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengendalian dan pemantauan atas kinerja yang dilaksanakan. Strategi ini dipandang cukup dapat membawa perubahan. PJ Bupati Kabupaten

Bekasi menyampaikan bahwa saat ini masyarakat perlahan mulai memberi atensi yang lebih untuk terlibat dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berbicara terkait ragam faktor peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan pemerintahan yang dapat dikatakan tepat dan sesuai target tujuan, sejatinya Kabupaten Bekasi memiliki beberapa peluang yang menjadi poin positif dan mendukung. Pertama, ditinjau dari sisi anggaran, kapasitas fiskal, Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang cukup bagus jika disandingkan dengan daerah-daerah lain. Sehingga dapat dikatakan, kondisi fiskal yang cukup stabil dapat memperluas ruang gerak pemerintah dalam melakukan optimalisasi anggaran bagi program-program yang akan dijalankan. Namun demikian, hal ini perlu diselaraskan dengan komitmen daerah terkait pemrioritasan anggaran dan optimalisasinya.

Faktor peluang kedua adalah dari segi Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh PJ Bupati Bekasi

“SDM di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi dapat dinilai cukup bagus dan mendukung untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Hanya saja hal ini perlu mendapatkan motivasi dan didorong dengan target yang terukur. Kapasitas SDM yang cukup berpeluang dapat dilihat dari adanya peningkatan akselerasi pemenuhan target pemerintah yang telah diselenggarakan melalui Rapim.”

Ketiga, peluang juga terkait dengan SDM dari masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri yang dirasa kritis dan proaktif. Karakter Masyarakat Kabupaten Bekasi dapat digambarkan sebagai masyarakat yang cukup vokal dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Hal ini justru dipandang sebagai hal positif oleh PJ Bupati Bekasi. Dengan adanya gerakan warga yang vokal semacam ini, terjalin sebuah komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Sekalipun beliau mengakui bahwa menghadapi dan menanggapi protes dan aspirasi masyarakat bukan pekerjaan yang mudah, hal ini lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan menghadapi kelompok masyarakat yang pasif. Sehingga dengan kata lain, adanya sikap kritis warga dan komitmen daerah dalam menciptakan ruang-ruang komunikasi dapat menjadi peluang yang baik untuk menjalankan pemerintahan.

Penjelasan dari informan PJ Bupati Bekasi terkait kondisi riil dan segala peluang dan hambatannya terkait pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Informan Ke-Delapan yaitu Bapak Epi Nurdin, SH selaku Kepala Bagian Bidang Hukum di Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi Bapak Epi Nurdin, SH dilaksanakan pada tanggal 22 Februari tahun 2023).

“Bekasi dipandang memiliki kekuatan yang cukup besar jika ditinjau dari posisinya sebagai kawasan industri dan juga sebagai salah satu buffer zone dari DKI Jakarta. Dalam perjalanan pemerintahan yang telah terlaksana, ada banyak kemajuan dan perkembangan yang cukup pesat dan signifikan yang telah dicapai oleh Kabupaten Bekasi. Bidang Hukum juga menjadi salah satu hal yang turut berperan dalam menciptakan substansi produk-produk hukum yang menunjang segenap Pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam menjalankan pemerintahan yang tepat dan sesuai dengan target dan tujuan. Salah satu contoh peran bidang Hukum dalam menangani kasus permasalahan kemiskinan yang ada di Kab Bekasi adalah terbitnya Keputusan Bupati tentang satuan tugas yang khusus menangani pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Bekasi. Selain itu, peran Bagian Hukum juga mengeluarkan Keputusan Bupati terkait pembentukan tim teknis untuk menangani pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Bekasi. Sehingga, ada dua tugas khusus dalam penanganan kemiskinan, terkait satuan tugas khusus dan juga tim teknisnya”

Kondisi hambatan dan peluang dalam percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi dalam Percepatan Pembangunan Daerah juga berkaitan erat dengan pencapaian target Indikator Makro terutama Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kabupaten Bekasi, hal ini selaras dengan pernyataan Informan Kelima, Dr. Iis Sandra Yanti, S.STP, M.IP selaku Kepala Bagian Administrasi Organisasi Setda Kabupaten Bekasi,

“Pencapaian Pembangunan di Kabupaten Bekasi sudah berkembang pesat, adalah peran pemerintah daerah dalam memastikan ketepatan pelaksanaan anggaran program kegiatan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), jadi TAPD memastikan terlebih dahulu terhadap Anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah dalam proses Asistensi dan Verifikasi RKA – DPA yang dilaksanakan tiap awal tahun, apakah isi DPA Perangkat Daerah tersebut sudah mengacu ke Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah atau belum, karena banyak pelaksanaan program kegiatan yang melenceng dari Sasaran yang ditetapkan melalui IKU, sehingga pada akhirnya target pembangunan tidak tercapai dan percepatan pembangunan tidak terlaksana”

Hambatan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak mengacu ke pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah masih lemahnya fungsi pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh TAPD, TAPD dalam melaksanakan verifikasi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) seharusnya lebih tajam mengacu ke pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bekasi. Misal Indikator Tingkat Kemiskinan yang diampu oleh Dinas Sosial, TAPD harus lebih jeli menelaah setiap rincian belanja pada DPA Dinas tersebut, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, terkadang sering terjadi Rincian Belanja yang tidak memberi dampak langsung kepada pencapaian IKU Daerah, misal masih terdapat rincian anggaran yang seharusnya ditujukan kepada Pengentasan Kemiskinan malah berisi Perjalanan Dinas Luar Daerah seperti *Study* Banding, Workshop atau Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis. Hal seperti ini akan menambah beban pada APBD Kabupaten Bekasi, namun target capaian IKU tetap tidak akan tercapai, sehingga pembangunan juga terhambat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Percepatan Pembangunan juga dikemukakan oleh Informan Ketujuh Dwy Sigit Andrian, S.STP, M.Si yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi, dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Maret, Pj Bupati Bekasi mengatakan

“Kabupaten Bekasi memiliki potensi tinggi dalam pencapaian kesejahteraan di masyarakat, melalui APBD yang sebesar 6 Trilyun lebih, seharusnya dapat memberikan dampak multiplier pembangunan yang cukup signifikan jika anggaran yang dilaksanakan Perangkat Daerah tepat sasaran, saat ini pembangunan masih belum optimal dan pelayanan publik yang kurang merata, sehingga banyak daerah khususnya Bekasi di sebelah Utara, masih cukup tertinggal kesejahteraan masyarakatnya, oleh karenanya saat ini sedang di rumuskan kemungkinan- kemungkinan untuk melakukan Pemekaran Wilayah Bekasi Utara di Balitbanga. Dalam hal pelayanan publik, Bekasi terus berupaya untuk menggagas inovasi-inovasi baru dalam hal pelayanan publik, inovasi ini diharapkan dapat mengatasi masalah jarak dan efisiensi biaya dan waktu, inovasi tersebut harus terus digali bersama-sama seluruh stakeholder yang ada, terutama dunia pendidikan atau akademisi-akademisi yang dapat menghantarkan ilmu-ilmu baru menjadi inovasi dan teknologi terapan yang bermanfaat bagi masyarakat”.

Dari wawancara dan pernyataan tersebut, dapat ditemukan faktor penghambat dalam pencapaian percepatan pembangunan daerah, antara lain belum meratanya pembangunan serta upaya pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, beberapa upaya dalam mengatasi hambatan tersebut diantaranya melalui upaya Pemekaran Wilayah Bekasi Utara dan Optimalisasi Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik, melalui Inovasi di Bidang Pelayanan Publik yang dikembangkan, diharapkan masyarakat mendapatkan manfaat berupa kemudahan jangkauan pelayanan, sehingga masyarakat yang berasal dari Wilayah Utara tidak perlu repot-repot datang ke pusat pemerintahan, sehingga mendapatkan efektivitas pelayanan dan efisiensi waktu yang optimal.

4.2.4. Strategi Intervensi yang dipilih dalam upaya percepatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bekasi

A. Analisa Hasil Penelitian

Analisa yang dipakai dalam pembahasan penelitian ini adalah menggunakan Analisa ASOCA untuk mendapatkan Strategi Intervensi yang tepat dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi. Analisa ASOCA adalah identifikasi sebagai faktor sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kemampuan, kekuatan, peluang, budaya atau kebiasaan dan kecerdasan atau ketajaman berpikir (*agility*) secara keseluruhan dapat meminimalisir ancaman dan memenangkan persaingan dalam dunia bisnis.

Dalam mengambil keputusan, organisasi harus mempertimbangkan faktor internal yang meliputi kemampuan, kekuatan, dan kelemahan serta faktor eksternal yang meliputi peluang, budaya, dan kecerdasan atau ketajaman pemikiran konsumen. Analisis ASOCA digunakan jika penentu strategi perusahaan mampu memaksimalkan peran faktor kemampuan, kekuatan dan manfaat peluang dan kecerdasan konsumen sekaligus waktu berperan sebagai alat untuk meminimalkan kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan ancaman yang timbul dan harus ditangani dengan tepat. Analisis ASOCA juga dapat digunakan untuk membantu analisis strategi dan referensi logis dalam diskusi sistematis tentang situasi perusahaan dan alternatif situasi perusahaan, serta alternatif utama yang mungkin dipertimbangkan perusahaan (Misrofinjah, 2020: 126-127).

Menurut Ermaya (2013: 18), ASOCA merupakan singkatan dari: *Ability* (Kemampuan), *Strength* (Kekuatan), *Opportunities* (Peluang), *Culture* (Budaya) dan *Agility* (Kecerdasan). Analisis ASOCA menambahkan unsur *Culture* (Budaya) dan *Agility* (Kecerdasan) sebagai unsur yang penting dalam menemukan strategi pemecahan masalah, pengambilan putusan dan dapat dikembangkan dalam mengikuti perubahan, perkembangan zaman dan kebutuhan. Sinergitas elemen-elemen ASOCA sangat penting dikelompokkan ke dalam lingkungan strategis internal dan eksternal yang dapat dibuat dalam bentuk matriks analisis ASOCA.

Matriks analisis ini cocok dengan Indonesia yang majemuk dan memiliki letak strategis di dunia. Merujuk pada pembagian faktor dalam penjelasan analisis ASOCA, hal tersebut dibagi menjadi dua hal yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor internal dalam analisis ASOCA adalah *Ability* (Kemampuan), *Strengths* (Kekuatan) dan *Agility* (Kecerdasan). Sementara untuk faktor eksternal meliputi *opportunities* (Peluang) dan *cultures* (Budaya). Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Bekasi, didapatkan Lima Faktor Internal dan Lima Faktor Eksternal yang mempengaruhi Percepatan Pembangunan di Kabupaten Bekasi, kemudian disusun sebagai sebuah matriks yang dikenal sebagai Matriks Sebelas Kotak. Dari data-data yang telah didapatkan dari penelitian, peneliti akan kembangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi bahan analisa sebagai berikut :

1. Faktor Internal :

A. Ability (Kemampuan)

Kemampuan berasal dari kata “mampu” yang berarti kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, dapat juga orang yang berada atau kaya, mempunyai harta berlebih, kemampuan juga dapat diartikan kesanggupan, kecakapan, kemampuan diri sendiri. Ability sesuai dengan hasil observasi dan penelitian yang peneliti lakukan pada objek penelitian Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat terbagi atas :

i. Kapasitas Fiskal

(Kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi)

Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 54 / PMK.07/2014) tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian ini, APBD Kabupaten Bekasi yang dapat diperuntukan Belanja Barang Jasa untuk kebutuhan Pembangunan diluar Belanja Pegawai adalah sebesar Rp. 2.665.481.980.536 (Dua koma Enam Trilyun Rupiah Lebih) dan Belanja

Bantuan Sosial sebesar Rp. 63.876.200.000 (Enam Puluh Tiga Milyar Rupiah Lebih) *Data LKPJ Bupati Bekasi Tahun 2022*. Kapasitas Fiskal Kabupaten Bekasi terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan Kabupaten Kota lainnya di Provinsi Jawa Barat.

B. Strength (Kekuatan)

Kekuatan atau ketangguhan berasal dari kata “tangguh” yang berarti sukar dikalahkan, kuat, handal, kuat sekali, tabah dan kuat, kukuh. Ketangguhan berarti pula kekuatan, keuletan. Dalam hal kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, dari hasil penelitian, yang termasuk dalam kekuatan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat dikelompokkan sebagai berikut

i. Kapasitas SDM Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi pemerintah.

Pengembangan kapasitas dapat dilakukan mengacu kepada proses dimana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri

Kapasitas SDM Aparatur di Kabupaten Bekasi dinilai sudah cukup baik, banyak potensi SDM unggul yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah, sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Pj Bupati Bekasi pada

wawancaranya di dalam penelitian ini. Hanya yang perlu ditingkatkan adalah kedisiplinan dan juga penerapan *Rewards and Punishment* (Penghargaan dan Hukuman) bagi pegawai yang berprestasi dan pegawai yang melanggar aturan dalam rangka motivasi peningkatan kinerja SDM aparatur di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Oleh karenanya, diciptakan yang namanya Merit System (Pola Pengembangan Karir ASN) yang mengacu pada pola kepangkatan, keahlian dan pengalaman kerja pegawai. Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Sistem Merit mulai dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bekasi sejak kepemimpinan Dr. H. Dani Ramdan, MT. Hal ini tentunya memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja nya dan mengasah keahliannya untuk memperoleh prestasi di Kabupaten Bekasi.

ii. Kondisi dan Letak Geografis Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu daerah di wilayah administratif Provinsi Jawa Barat posisi geografisnya berada tepat di sebelah timur Jakarta, Kabupaten Bekasi berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta di barat, Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Karawang di timur, serta Kabupaten Bogor di selatan. Sebagai penyangga Ibukota DKI Jakarta, pastinya Kabupaten Bekasi dipengaruhi oleh imbas bonus demografi dimana sebagian besar merupakan pendatang yang berasal dari daerah untuk bekerja di Ibukota dan tinggal menetap maupun

hanya singgah untuk Bekasi bekerja di Kabupaten Bekasi pada waktu tertentu.

iii. Sarana Prasarana Infrastruktur

Infrastruktur atau sarana prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan.[butuh rujukan] Infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

Infrastruktur di Kabupaten Bekasi terbilang sudah cukup baik, hal ini didukung melalui data konektivitas antar wilayah di Kabupaten Bekasi dimana dari total luas wilayah Kabupaten Bekasi sebesar 1.273,88 km² memiliki tingkat konektivitas antar wilayah sebesar 97% , Kabupaten Bekasi pun mulai membangun lebih banyak lagi jalan antar wilayah, dimana sudah ada Jalan Tol Gabus (Cibitung – Marunda) yang mempermudah pengangkutan logistik dari tol cikampek ke pelabuhan Tanjung Priok melalui Marunda. Tentunya hal ini akan meningkatkan juga perekonomian masyarakat di sekitar pintu keluar tol tersebut jika bisa memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu di beberapa tahun ke belakang sudah dibangun juga Flyover dan Underpass untuk mengatasi kemacetan, jalan penghubung antar desa dan kecamatan setiap tahun juga dibangun.

Namun terdapat kelemahan dalam infrastruktur di kabupaten Bekasi, yaitu tingginya mobilitas kendaraan / alat berat yang melalui jalan-jalan di Bekasi, baik itu melalui jalan utama Kabupaten dan juga Jalan penghubung antar wilayah perbatasan (Jalan Negara Jalur Pantura), sehingga banyak terjadi kerusakan jalan di akibatkan dari batas maksimal beban yang sering dilanggar oleh para pengemudi kendaraan atau alat berat tersebut saat melalui jalur Kabupaten Bekasi, sehingga sering terjadi kemacetan di Kabupaten Bekasi.

C. Agility (Kecerdasan)

Kecerdasan berasal dari kata “cerdas” yang berarti sempurna perkembangan akal budi, tajam pikiran, kesempurnaan dalam pertumbuhannya, kesempurnaan akal budinya, ketajaman pikiran dan kepandaian. Kemampuan saja tidak cukup, harus dengan kecerdasan dalam mengelola pikir, menganalisis suatu informasi untuk dijadikan bahan putusan. Kecerdasan yang ditemui di dalam hasil penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut :

i. Efektivitas Penggunaan Anggaran

Anggaran merupakan rencana kegiatan yang di persentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan

dalam beberapa periode yang akan datang. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Bahwa efektif tidaknya penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat itu adalah ketika anggaran itu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya atau dengan kata lain dibelanjakan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dalam memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan memantau kinerja perangkat daerah tiap bulannya, Pj Bupati Bekasi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, selalu rutin mengadakan Rapat Pimpinan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka memastikan adanya kemajuan dalam penyerapan APBD yang terintegrasi dengan Kinerja Perangkat Daerah.

Efektivitas Penggunaan Anggaran juga dibutuhkan agar memastikan penggunaan anggaran digunakan tepat sasaran, mengarah kepada pencapaian target-target yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RKPD, RPJMD dan RPJPD.

ii. Kecakapan Kepala Daerah

Kecakapan dapat diartikan sebagai kemampuan/kesanggupan/kepandaian dan kemahiran seseorang dalam mengerjakan sesuatu, dalam konteks penelitian ini adalah Kecakapan dalam memimpin Kabupaten Bekasi yang merupakan faktor internal Agility (Kecerdasan). Dalam beberapa wawancara yang sudah dilaksanakan, dan beberapa observasi yang dilakukan dengan menelaah akun-akun media sosial forum masyarakat

Kabupaten Bekasi dan berbagai tautan pada berita-berita online di Kabupaten Bekasi, di dapatkan bahwa sebagian besar masyarakat dan ASN, puas dengan kinerja Pj Bupati Bekasi Dr. H. Dani Ramdan, MT, melalui tangan dinginnya, Kabupaten Bekasi mengalami perubahan kemajuan pembangunan yang cukup signifikan, hal ini dibuktikan dengan mulai banyaknya jalan-jalan rusak di Kabupaten Bekasi yang diperbaiki dengan serius, serta terbangunnya fasilitas-fasilitas umum yang tersebar di pelosok Kabupaten Bekasi seperti Ruang Kelas Baru pada sekolah-sekolah, Rehabilitasi dan perbaikan gedung-gedung pelayanan publik, serta Pembangunan Rutilahu (Rumah tidak layak huni) bagi masyarakat tidak mampu, hal ini diperkuat dengan diraihnya beberapa penghargaan terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi, koordinasi lintas sektor pun semakin solid, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah semakin terlihat kompak dan saling mendukung, serta keterlibatan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi dalam progress pembangunan melalui TJSLP (Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan) atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang angka keikutsertaannya terus meningkat berkat tangan dingin dan kecakapan pimpinan di Kabupaten Bekasi saat ini.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal dalam penelitian yang menggunakan metode Analisa ASOCA sebagai alat pengambil kebijakan menentukan faktor-faktor eksternal yang ada di Kabupaten Bekasi, adapun yang menjadi faktor eksternal dalam metode analisa ASOCA adalah *Opportunity* (Peluang) dan *Culture* (Budaya)

A. *Opportunity* (Peluang)

Peluang berarti ruang gerak, baik yang bersifat konkret maupun abstrak dan memberikan kesempatan, kemungkinan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi usah untuk mencapai cita-cita tujuan dan program. Peluang di dalam penelitian ini artinya dapat menangkap apa yang menjadi kesempatan untuk mendapatkan manfaat bagi kemajuan pembangunan daerah. Peluang yang ada di Kabupaten Bekasi terpetakan sebagai berikut :

i. Kontribusi Perusahaan / Sektor Swasta sebagai bagian dari Kawasan Industri yang ada di Kabupaten Bekasi

Melalui data sekunder yang didapat dari Tim Fasilitasi TJSLP Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi memiliki 10 Kawasan Industri besar yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi, dan di dalamnya terdapat 7.339 perusahaan yang menjalankan usaha nya di Kabupaten Bekasi, namun baru sekitar 48 perusahaan yang aktif dan ikut berpartisipasi dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat serta memberikan laporannya kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP, tentunya ini perlu dilakukan pendalaman lagi karena perbandingan antara jumlah partisipan TJSLP dan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi tersebut

terbilang masih sangat sedikit dan yang dilakukan oleh perusahaan hanya sebatas bantuan-bantuan sosial saja, padahal perusahaan dapat juga dilibatkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sarana prasarana kemasyarakatan lainnya seperti, taman, sekolah, rehabilitasi pasar dan sebagainya. Fenomena ini sangat disayangkan karena Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang memiliki Kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara, namun jumlah perusahaan yang berperan serta dalam CSR sangat sedikit.

ii. Peran serta dunia pendidikan / Civitas Akademik dalam pembangunan

Perguruan tinggi memiliki peranan strategis dalam memajukan suatu daerah baik para civitas akademisi maupun mahasiswanya yang mana mencakup empat aspek peranan utama yakni sebagai educator, catalysator, facilitator dan developer demi mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan di daerah yang cukup kompleks sesuai dengan karakteristik tiap daerah itu sendiri.

Dalam mewujudkan kolaborasi Penta Helix, dimana Penta Helix merupakan sebuah konsep kolaborasi kerjasama sinergitas Pemerintah, Universitas, Industri, Masyarakat dan Media yang bersinergi dimana posisinya Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, Universitas sebagai pusat pengembangan penelitian, dan industri sebagai penyedia kebutuhan layanan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, Masyarakat sebagai modal utama dalam penyediaan SDM dan pelaksana program pembangunan di

level RT-RW dan Media berperan sebagai Media Publikasi atas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Perguruan Tinggi juga memiliki peran penting dalam mendukung program peningkatan Sumber Daya Manusia yang menjadi salah satu fokus utama dari program prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi. Terdapat kurang lebih 10 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kabupaten Bekasi, dan keseluruhannya telah memberikan kontribusi secara baik melalui pendidikan. Namun, masih disayangkan karena Kabupaten Bekasi tidak memiliki Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dapat menjadi Ikon Kebanggaan dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Bekasi.

B. Culture (Budaya)

Budaya berarti pikiran, akan budaya, hasil, adat istiadat, dan sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju) atau sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sulit diubah karena kesepakatan dalam lingkungan tertentu yang terus menerus dipelihara. Dengan budaya orang akan maju dan modern dan selalu hidup pada zamannya. Yang termasuk analisa Budaya sesuai dengan teori Analisa ASOCA antara lain :

i. Sosial Kultur Masyarakat

Kultur sosial adalah iklim atau budaya yang lahir dari proses interaksi seseorang dengan orang lain. Atau bergaulnya seseorang dengan orang lain, dalam lingkup kecil maupun besar, dengan anggota keluarga, dengan teman kerja, teman belajar, dengan sesama aktivis, maupun dalam lingkup lebih luas yaitu masyarakat.

Kabupaten Bekasi terdiri atas masyarakat yang Heterogen, hal ini tentunya menjadikan banyaknya kultur budaya yang bervariasi pula, dengan banyaknya pendatang yang datang ke Kabupaten Bekasi untuk mencari pekerjaan, tentunya akan menambah bonus demografi yang signifikan dari tahun ke tahun bagi Kabupaten Bekasi, begitu pun dengan iklim sosial politik yang terjadi, kini masyarakat Kabupaten Bekasi yang majemuk bersikap semakin kritis terhadap kinerja Pemerintah Daerah, hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

ii. **Aspirasi / Kebutuhan masyarakat**

Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok.

Di dalam model perencanaan pembangunan daerah dikenal istilah *Top-Down* dan *Bottom Up*, Perencanaan top down merupakan perencanaan dimana penguasaan tertinggi berada di pemerintah sebagai pemberi arahan, tanpa harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat (Sururi, 2016). Sedangkan Bottom Up adalah Perencanaan yang menjaring aspirasi atau kebutuhan dari masyarakat, Seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menggunakan model perencanaan *Bottom Up*, kebutuhan masyarakat dijaring oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai wadah atau forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari mulai Musrenbang tingkat

Desa/Kelurahan , Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Provinsi hingga Musrenbang Nasional. Aspirasi / kebutuhan yang terjadi di masyarakat tentunya tidak serta merta dapat di akomodir semua, ada beberapa kriteria yang membuat kebutuhan tersebut masuk ke dalam skala prioritas, dan tentunya kebutuhan tersebut sejalan dengan tema pembangunan yang sudah ditetapkan tahun sebelumnya menyesuaikan dengan isu strategis daerah tersebut.

3. Matriks Operasionalisasi Konsep Strategi Intervensi

Tabel. 4.3

Operasionalisasi Konsep Strategi Intervensi

Judul	Dimensi	Fokus / Sub Fokus	Indikator / Sub Indikator
Strategi Intervensi Pemerintah Daerah dalam upaya Percepatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bekasi -	1. Lingkungan Internal : Faktor-Faktor : a) Kapasitas Fiskal yang kuat b) Kecakapan Kepala Daerah c) Kapabilitas SDM aparatur d) Efektivitas Penggunaan Anggaran e) Kondisi Geografis Kabupaten Bekasi	1.1. Ability (Kemampuan) • Kapasitas Fiskal	Strategi AbO Menggunakan Kapasitas Fiskal, CSR Perusahaan dan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mengoptimalkan kinerja dalam rangka percepatan pembangunan

Provinsi Jawa Barat		1.2. Strengths (Kekuatan)	Strategi SO Menggunakan Kapasitas SDM Aparatur yang baik, Kondisi Geografis yang Strategis dan Memanfaatkan Sarana Prasaran Infrastruktur yang baik dalam rangka percepatan pembangunan melalui kerjasama Pentahelix
		1.3. Agility (Kecerdasan)	Strategi AgO Menggunakan Kecakapan Kepala Daerah dalam rangka percepatan pembangunan dengan mengoptimalkan kolaborasi pentahelix dan CSR
	2. Lingkungan Eksternal : Faktor-Faktor : a) Sosial Kultur Masyarakat b) Peran Serta Perusahaan / Sektor Swasta	2.1 Opportunities (Peluang)	Strategi AbC Mengoptimalkan pengelolaan kapasitas fiskal yang baik dengan menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat

	c) Aspirasi / Kebutuhan Masyarakat	• Kontribusi Perusahaan /	
	d) Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi	Sektor Swasta dalam CSR	
	e) Infrastruktur Prasarana Wilayah	2.2. Culture (Budaya) • Sosial Kultur Masyarakat • Aspirasi Kebutuhan Masyarakat	Strategi SC Mengoptimalkan Kecakapan Komunikasi Kepala Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
			Strategi AgC Memadukan Kecakapan Kepala Daerah dalam meyakinkan Perusahaan dan Sektor Swasta untuk ikut dalam percepatan pembangunan Daerah

Keterangan :

- 8) Strategi AbO = Menggunakan kemampuan untuk memanfaatkan peluang
- 9) Strategi SO = Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
- 10) Strategi AgO = Menggunakan kecerdasan untuk memanfaatkan peluang
- 11) Strategi AbC = Melihat kemampuan untuk menghadapi tuntutan lingkungan

perubahan budaya

12) Strategi SC = Menggunakan kekuatan untuk tanggap terhadap pengaruh perubahan budaya

13) Strategi AgC = Menggunakan kecerdasan untuk mensiasati pengaruh perubahan buday

Tabel 4.4
Matriks Sebelas Kotak

FAKTOR EKSTERNAL	FAKTOR INTERNAL	ABILITY	STRENGTHS	AGILITY
		(KEMAMPUAN)	(KEKUATAN)	(KECERDASAN)
OPPORTUNITIES (PELUANG)	(AbO)	Kapasitas Fiskal Kabupaten Bekasi yang besar dapat digunakan untuk memanfaatkan potensi pemberdayaan / peningkatan kemampuan atau keahlian masyarakat dalam rangka percepatan	(SO)	Dengan Kepala Daerah yang handal dan bertangan dingin, dapat digunakan untuk mengarahkan Perangkat Daerah di Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Efektivitas
	(AgO)	Kabupaten Bekasi yang memiliki potensi banyaknya Perguruan Tinggi Swasta dapat memaksimalkan kerjasama-kerjasama dalam bidang ilmiah berkolaborasi dengan SDM Aparatur yang handal, untuk merumuskan kebijakan-kebijakan		

	pembangunan melalui inovasi untuk pengurangan angka pengangguran.	penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan memperbaiki sistem data yang digunakan sebagai dasar pengentasan angka kemiskinan melalui inovasi-inovasi baru	yang dapat digunakan untuk pemecahan isu-isu Aktual yang sedang terjadi, sebagai contoh masalah persampahan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di Bidang Lingkungan Hidup dalam menciptakan berbagai Inovasi teknologi Tepat Guna Pengelolaan Sampah dan menyebarkannya di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bekasi. Perguruan Tinggi juga dapat berperan dalam memberikan masukan kebijakan dalam
--	--	--	---

			pengelolaan peran serta perusahaan melalui CSR / TJSLP di Kabupaten Bekasi. Melalui Program KKN Mahasiswa, Perguruan Tinggi dapat diandalkan untuk mendapatkan data real time cpcl yang valid untuk mendapatkan bantuan maupun program pembangunan
CULTURE (BUDAYA)	(AbC) Dengan Kapasitas Fiskal yang tinggi, Pemerintah Daerah bisa melaksanakan program kegiatan yang bersifat tepat sasaran kepada Masyarakat,	(SC) Dengan kecakapan yang dimiliki Kepala Daerah, Pj Bupati Bekasi dapat meminimalisir perbedaan-perbedaan pendapat yang sering terjadi di Masyarakat, Bentuk Kontradiktif	(AgC) Penerapan Model Pentahelix yang mulai diterapkan di Kabupaten Bekasi akan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pembangunan di kabupaten Bekasi,

	dalam hal ini Pemda bisa merangkul masyarakat untuk persamaan persepsi dalam membangun Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk aktif berperan serta dalam tahapan perencanaan hingga pengawasan	terhadap pelaksanaan Pembangunan dapat di hilangkan dengan lebih intens membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, forum maupun lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Dengan kemampuan SDM Aparatur yang baik dan mumpuni, melalui Perangkat Daerah bisa melaksanakan program kegiatan yang bersifat tepat sasaran pada	melalui Inovasi dan Teknologi yang diciptakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi, Permodalan dari sektor Swasta, Penerapan oleh Masyarakat di Lingkungan masing-masing, kemudian pihak media yang bertugas untuk menyebarluaskan informasi tersebut akan memberi dampak luas bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Pemanfaatan inovasi dan teknologi melalui pengembangan sistem
--	--	---	---

	percepatan pembangunan baik melalui pendanaan APBD maupun Non APBD.	kebutuhan masyarakat, Para Pejabat dan Kepala Dinas dapat lebih intens berkomunikasi dengan masyarakat di Kabupaten Bekasi, mengetahui kebutuhan mereka dan menaruh skala prioritas ke dalam Rencana Kerja ke depan	informasi yang terintegrasi dalam bidang pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah akan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat dengan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik yang optimal.
--	---	---	--

Adapun, strategi intervensi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Bekasi setelah dilakukan analisa melalui Teori Analisa Pengambilan Kebijakan ASOCA diatas adalah sebagai berikut :

1. AbO (Ability Opportunity)

Kapasitas Fiskal Kabupaten Bekasi yang besar, dapat digunakan untuk memanfaatkan potensi SDM Kabupaten Bekasi dalam rangka peningkatan kemampuan atau keahlian masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan

melalui inovasi inovasi untuk pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Strateginya adalah sebagai berikut :

- a) Pengalokasian anggaran yang diberikan untuk beasiswa program pendidikan dan pelatihan vokasi industrial.
- b) Pengalokasian anggaran untuk memperbanyak MoU / Nota Kesepahaman antara sekolah-sekolah dengan perusahaan untuk mempekerjakan lulusan sekolah kejuruan asli Kabupaten Bekasi
- c) Dengan anggaran yang ada membuat suatu sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Bekasi pencari kerja.
- d) Memperbanyak alokasi anggaran untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keahlian industrial dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Kabupaten Bekasi

2. Strength Opportunity (SO)

SO) Dengan kecakapan Kepala Daerah yang handal dan bertangan dingin, dapat digunakan untuk mengarahkan Perangkat Daerah di Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Efektivitas penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan memperbaiki sistem data yang digunakan sebagai dasar pengentasan angka kemiskinan melalui inovasi-inovasi baru.

Strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Daerah dapat melakukan *upgrade* atau peningkatan pada Sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa, pengendalian dan evaluasi hingga pengawasan yang terintegrasi sehingga keseluruhan sistem berjalan dengan baik dan terciptanya *E-Government* yang baik di Kabupaten Bekasi.
- b) Pengawasan perumusan alokasi anggaran yang lebih ketat di fokuskan pada pencapaian indikator makro dan indikator kinerja utama Kabupaten Bekasi, hal ini dapat dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses Verifikasi RKA/DPA Perangkat Daerah.
- c) Menciptakan inovasi baru dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dengan menggali potensi pajak dan retribusi baru dan mengoptimalkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam menggali potensi penerimaan pendapatan melalui program-program inovatif.
- d) Menciptakan inovasi Data Desa Presisi yang dapat menggambarkan secara lengkap kondisi dari setiap desa yang ada di Kabupaten Bekasi, mulai dari Jumlah penduduk miskin (*by name by Address*), Data pemetaan calon penerima bantuan RUTILAHU (Rumah tidak layak huni), jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran berdasarkan jenis pendidikan, detail di tiap-tiap desa.
- e) Penerapan *Rewards* atau Penghargaan terhadap Perangkat Daerah atau Pegawai yang berprestasi atau berkinerja baik dan juga pemberian *Punishment* atau Hukuman terhadap Perangkat Daerah atau pegawai yang melanggar aturan atau berkinerja buruk yang dikemas dalam penilaian kinerja yang

terintegrasi dalam sebuah inovasi sistem informasi di bidang kepegawaian sehingga dapat dipantau oleh semua pegawai di Kabupaten Bekasi dan menumbuhkan jiwa kompetitif dan motivasi bagi seluruh pegawai di Kabupaten Bekasi.

3. Agility Opportunity (AgO)

Kabupaten Bekasi yang memiliki potensi banyaknya Perguruan Tinggi Swasta yang dapat memaksimalkan kerjasama dalam bidang ilmiah, berkolaborasi dengan SDM Aparatur yang handal, untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan untuk pemecahan isu-isu Aktual yang sedang terjadi, sebagai contoh masalah persampahan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di Bidang Lingkungan Hidup dalam menciptakan berbagai Inovasi teknologi Tepat Guna Pengelolaan Sampah dan menyebarkannya di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bekasi.

Strategi yang dapat dilakukan yaitu :

- a) Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga Perguruan Tinggi untuk menjaring Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah menjadi Bahan Bakar Minyak atau Sumber Daya lain yang sudah di hasilkan, untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Perangkat Daerah terkait (Badan Litbang) dalam hal memperbaiki kualitas dan membantu pendanaan fasilitasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) hingga memfasilitasi pendanaan dari Perusahaan

melalui TJSLP atau CSR dalam hal permodalan untuk diperbanyak dan disebar di seluruh desa di Kabupaten Bekasi.

- b) Memperbanyak MoU dan kesepakatan kerjasama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan dan kurikulum sekolah di Kabupaten Bekasi serta kerjasama pemberian beasiswa bagi pelajar asli Kabupaten Bekasi yang berprestasi
- c) Bersama-sama pihak Akademisi untuk merumuskan konsep baru pendanaan pembangunan yang ditetapkan melalui perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur kontribusi perusahaan melalui TJSLP atau CSR di Kabupaten Bekasi.
- d) Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Perguruan Tinggi dalam hal pemenuhan data realtime data Calon Penerima Calon Lokasi yang benar-benar valid dan independen didapat langsung dari desa-desa yang membutuhkan. Program KKN mahasiswa juga bisa membantu masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomiannya melalui pengembangan dan promosi produk-produk UMKM lokal.

4. Ability Culture (AbC)

Dengan Kapasitas Fiskal yang tinggi, Pemerintah Daerah bisa melaksanakan program kegiatan yang bersifat tepat sasaran kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah bisa merangkul masyarakat untuk persamaan persepsi dalam membangun Kabupaten Bekasi, pemerintah daerah dapat melibatkan organisasi

masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk aktif berperan serta dalam tahapan perencanaan hingga pengawasan percepatan pembangunan baik melalui pendanaan APBD maupun Non APBD.

Strateginya adalah melalui :

- a) Pemetaan pemberian prioritas anggaran program kegiatan yang berdasarkan kebutuhan dan pencapaian target-target indikator makro.
- b) Bersama masyarakat dan stakeholder lain menjaring kebutuhan masyarakat merumuskan program prioritas.
- c) Bersama masyarakat dan stakeholder mengawasi penggunaan dana APBD dan Non APBD yang digunakan untuk pembangunan.

5. Strength Culture (SC)

Dengan kecakapan yang dimiliki Kepala Daerah, Pj Bupati Bekasi dapat meminimalisir perbedaan-perbedaan pendapat yang sering terjadi di Masyarakat, bentuk kontradiktif terhadap pelaksanaan Pembangunan dapat di hilangkan dengan lebih intens membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, forum maupun lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bekasi.

Dengan kemampuan SDM Aparatur yang baik dan mumpuni, melalui Perangkat Daerah bisa melaksanakan program kegiatan yang bersifat tepat sasaran pada kebutuhan masyarakat, Para Pejabat dan Kepala Dinas dapat lebih intens berkomunikasi dengan masyarakat di Kabupaten Bekasi, mengetahui kebutuhan mereka dan menaruh skala prioritas ke dalam Rencana Kerja ke depan.

Strateginya adalah melalui :

- a) Pembentukan forum-forum kemasyarakatan di bawah naungan Pemerintah Daerah yang merangkul tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi sebagai anggota, sehingga aspirasi dan kebutuhan dari kelompok masyarakat dan kondisi real pemerintah daerah tersampaikan sehingga tidak ada *GAP* lagi diantara masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- b) Bersama forum masyarakat merumuskan daftar prioritas kebutuhan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan tema pembangunan tahun yang akan datang.
- c) Melibatkan Forum Kemasyarakatan yang telah dibentuk untuk ikut serta dalam tahapan perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan program kegiatan tentunya dengan memperhatikan aturan dan kondisi yang berlaku.

6. Agility Culture (AgC)

Penerapan Model Pentahelix yang mulai diterapkan di Kabupaten Bekasi akan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pembangunan di kabupaten Bekasi, melalui Inovasi dan Teknologi yang diciptakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi, Permodalan dari sektor Swasta, Penerapan oleh Masyarakat di Lingkungan masing-masing, kemudian pihak media yang bertugas untuk menyebarluaskan informasi tersebut akan memberi dampak luas bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Pemanfaatan inovasi dan teknologi melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dalam bidang pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah akan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat dengan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik yang optimal.

Strateginya adalah melalui :

- a) Optimalisasi model Pentahelix dalam Pembangunan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pembangunan melalui kolaborasi Pentahelix di Kabupaten Bekasi
- b) Membangun inovasi Sistem Informasi Pelayanan Publik yang terintegrasi dari Pemerintah Daerah hingga ke Pemerintah Desa yang mengintegrasikan sistem informasi kependudukan, sistem informasi kesehatan (BPJS dan KIS), sistem informasi telekomunikasi, sistem informasi pelayanan perpajakan dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- c) Memperkuat jaringan internet di desa-desa guna mendukung pelaksanaan pengintegrasian seluruh layanan dimaksud.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, tentang Strategi Intervensi Pemerintah Daerah dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bekasi – Provinsi Jawa Barat, dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjawab perumusan masalah pada awal penelitian, kesimpulan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan data yang diperoleh, Strategi yang saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan adalah :
 - a Optimalisasi pembangunan infrastruktur kewilayahan melalui skema pendanaan yang tradisional (APBD – APBD Provinsi – APBN)
 - b Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Rutin yang dilaksanakan tiap minggu oleh Kepala Daerah untuk memantau percepatan penyerapan anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah
 - c Adanya pola kolaborasi dengan sektor swasta melalui TJSLP atau CSR namun pelaksanaannya belum optimal.
 - d Kerjasama dengan Perguruan Tinggi sudah terjalin namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para Pejabat Kepala Perangkat Daerah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis.

- e. Pembangunan berbasis data, namun data diperoleh melalui Kepala Desa di masing-masing desa yang tingkat validitas nya masih rendah dikarenakan banyak kasus terjadi bahwa data penduduk miskin / calon penerima bantuan ternyata kerabat dari Kepala Desa (dalam hal ini akhirnya banyak pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran).
 - f. Belum optimalnya penggalian sektor-sektor Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga APBD tidak bisa bertambah dan alokasi Belanja Barang Jasa Pembangunan selalu kurang setiap tahunnya.
2. Berdasarkan data yang diperoleh, faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya percepatan pembangunan adalah :

Faktor Pendorong antara lain :

- a. Ketegasan dan Kecakapan Kepala Daerah
- b. SDM Aparatur yang kompeten
- c. Potensi keikutsertaan stakeholder Pentahelix dalam upaya percepatan pembangunan (Pemerintah, Perusahaan, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Media)
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan yang ketat dari Instansi terkait dibawah koordinnasi Kepala Daerah

Faktor Penghambat antara lain :

- a. Kondisi Politik yang tidak kondusif (Pergantian beberapa kali Kepala Daerah)
- b. Kultur Sosial Masyarakat Kabupaten Bekasi yang bersifat kritis dan malas

- c. Kekosongan jabatan-jabatan Pejabat Tinggi Pratama dan Pengawas yang sampai saat ini belum terisi
- d. Kurangnya Ide-Ide Inovatif dari para Kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan program kegiatan berbasis masyarakat
- e. Kondisi Geografis Kabupaten Bekasi yang menimbulkan ketimpangan dalam pemerataan pembangunan. (Bekasi Utara – Bekasi Selatan)

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil analisa ASOCA yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu “Strategi Intervensi apa yang tepat bagi Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat”. Saran tersebut antara lain :

- a) Dalam hal percepatan pembangunan pada bidang penurunan Tingkat Pengangguran, dapat dilakukan strategi intervensi melalui :
 - Penyusunan Peraturan Daerah tentang ketentuan persentase penyerapan tenaga kerja lokal
 - Pemerintah Daerah harus memfokuskan alokasi anggaran untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pendidikan vokasi dan keahlian industrial dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Kabupaten Bekasi dalam jumlah peserta yang signifikan
 - Beasiswa kepada pemuda lokal (asli bekasi) yang masuk kategori keluarga miskin dan berprestasi.

b) Dalam hal percepatan pembangunan pada bidang penurunan Angka Kemiskinan, dapat dilakukan strategi intervensi sebagai berikut :

- Membenahi database orang miskin melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi melalui Program KKN Mahasiswa dan membandingkannya dengan data yang berasal dari Desa
- Menciptakan inovasi baru berbentuk Data Desa Presisi berbasis Geospasial, yang validitas datanya dapat dipakai sebagai dasar pemberian bantuan dan pelaksanaan pembangunan di desa.
- Memfasilitasi program kegiatan yang pro terhadap penduduk miskin di Kabupaten Bekasi, salah satunya dengan inovasi pelayanan publik yang terintegrasi.
- Pemberian Bantuan Permodalan bagi Petani, Nelayan dan Pedagang atau UMKM Kecil
- Mengoptimalkan kolaborasi di bidang pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama Pentahelix (Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Media).

c) Dalam hal percepatan pembangunan pada bidang Infrastruktur Wilayah, dapat dilakukan strategi intervensi sebagai berikut :

- Optimalisasi model Pentahelix dalam Pembangunan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pembangunan melalui kolaborasi Pentahelix di Kabupaten Bekasi

- Bersama-sama pihak Akademisi dan stakeholder lain merumuskan konsep baru pendanaan pembangunan yang ditetapkan melalui perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur kontribusi perusahaan melalui TJSLP atau CSR di Kabupaten Bekasi.
 - Melibatkan peran forum-forum kemasyarakatan dalam proses perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku.
 - Dalam upaya penanganan masalah persampahan di Kabupaten Bekasi yaitu dengan Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga Perguruan Tinggi untuk menjaring Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah menjadi Bahan Bakar Minyak atau Sumber Daya lain yang sudah di hasilkan, untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Perangkat Daerah terkait (Badan Litbang) dalam hal memperbaiki kualitas dan membantu pendanaan fasilitasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) hingga memfasilitasi pendanaan dari Perusahaan melalui TJSLP atau CSR dalam hal permodalan untuk diperbanyak dan disebar di seluruh desa di Kabupaten Bekasi.
- d) Dalam hal percepatan pembangunan pada bidang Ekonomi, dapat dilakukan strategi intervensi sebagai berikut :
- Menciptakan inovasi baru dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dengan menggali potensi pajak dan retribusi baru dan mengoptimalkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

dalam menggali potensi penerimaan pendapatan melalui program-program inovatif

- Optimalisasi Pendanaan Pembangunan melalui TJSLP / CSR yang dilakukan dengan melakukan Revisi terhadap Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan / CSR di Kabupaten Bekasi, dimana dibuat skema yang memungkinkan sektor swasta dapat memberikan bantuan berupa pembangunan fisik yang dilakukan di Kabupaten Bekasi.
- e) Dalam hal percepatan pembangunan pada bidang Reformasi Birokrasi / Pemerintahan, dapat dilakukan strategi intervensi sebagai berikut :
- Penataan SDM Aparatur yang kompeten, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), menjalankan sistem Merit dalam pengelolaan kepegawaian dan melaksanakan pengisian pemetaan jabatan melalui metode *right man on the right place* dan mengedepankan integritas (Non Transaksional).
 - Pj Bupati Bekasi dapat melakukan upgrade atau peningkatan pada Sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa, pengendalian dan evaluasi hingga pengawasan yang terintegrasi sehingga keseluruhan sistem berjalan dengan baik dan terciptanya E-Government yang baik di Kabupaten Bekasi.
 - Pengawasan perumusan alokasi anggaran yang lebih ketat di fokuskan pada pencapaian indikator makro dan indikator kinerja utama Kabupaten Bekasi, hal ini dapat dilakukan oleh Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses Verifikasi RKA/DPA Perangkat Daerah.

- Membangun inovasi Sistem Informasi Pelayanan Publik yang terintegrasi dari Pemerintah Daerah hingga ke Pemerintah Desa yang mengintegrasikan sistem informasi kependudukan, sistem informasi kesehatan (BPJS dan KIS), sistem informasi telekomunikasi, sistem informasi pelayanan perpajakan dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- Perluasan pelayanan jaringan internet gratis sampai ke desa guna mendukung pelaksanaan pengintegrasian pelayanan publik yang merata.
- Mengedepankan inovasi daerah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bekasi, dengan Inovasi Daerah, masyarakat akan mendapatkan penyegaran dalam hal kenyamanan dan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Bintoro Tjokroamidjoyo, Mustopadidjoyo A.R, 1980. *Teori Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta, Gunung Agung*
- Bayu Surya Ningrat, 1990. *Mengenal Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Rineka Cipta*
- Etzioni, 1985, *Organisasi Organisasi Modern*, Jakarta, Universitas Indonesia
- J.G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Mataram, Sinar Grafika
- Miriam Budiarjo, 1994, *Pembangunan Politik, Situasi Global, Dan Hak Asasi Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka
- Morgan, Colin dan Stephen, Murgatroyd. 1994. *Total Quality Management in the*
- Muhadam Labolo, 2008, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Muhammad Riyaas Rasyid, , 2000, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya
- Nasution Zulkarimen, 1996, *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada
- Pasolong dalam Supriadi Legino, 2017, *Teori Administrasi Publik*, Jakarta, Alfabeta
- Public Sector: An Interactive Perspective*. Buckingham. Open University
- Sondang P Siagian, 2005, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Haji Masagung
- Talizidhuhu Ndraha, 1990, *Kybernology : ilmu pemerintahan baru*, Jakarta, Rineka Cipta

Todaro Michael P – Stephen C Smith, 2008, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, Erlangga

PERATURAN :

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.

FADLY MARIS SATRIO, SE.

NPM. 20651010241

Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara.

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN / KUESIONER PENELITIAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara

Jumlah dan Pemetaan Informan :

1. Pj. Bupati Bekasi
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi
5. Plt. Kepala Dinas Pendidikan
6. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
7. Plt. Kepala Dinas Permukiman Rakyat dan Pertanahan
8. Asisten Daerah II
9. Asisten Daerah III

10. Plt. Kepala Dinas Kesehatan
11. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
12. Kepala Bagian Adm Kerjasama Setda
13. Kepala Bagian Organisasi Setda
14. Kepala Bagian Hukum Setda
15. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
16. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
17. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA
18. Kepala Bidang Prasarana Wilayah
19. Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Data dan Informasi
Pembangunan
20. Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pembangunan Manusia
21. Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial
22. Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Ekonomi Kreatif
23. Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Sumber Daya Alam
24. Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Infrastruktur Wilayah
25. Camat Sukawangi
26. Civitas Akademisi
27. Penggiat Organisasi di Kabupaten Bekasi
28. Insan Pers / Media
29. LSM
30. Perwakilan Tokoh Masyarakat

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan :

Jabatan / Pekerjaan :

Pangkat / Golongan :

Tanggal Wawancara :

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana gambaran umum pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi menurut pandangan bapak/ibu?	
2	Apakah bapak/ibu sudah puas dengan kemajuan pembangunan yang sudah dicapai oleh Kabupaten Bekasi?	
3	Apa saja strategi yang sudah bapak/ibu lakukan selama menjabat dalam rangka mengoptimalkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Bekasi	
4	Bagaimana peran serta organisasi yang bapak / ibu pimpin dalam upaya mengejar Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bekasi?	
5	Bagaimana peran serta organisasi yang bapak / ibu pimpin dalam upaya mengejar	

	target capaian Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Bekasi?	
6	Bagaimana peran serta organisasi yang bapak / ibu pimpin dalam upaya mengejar target capaian Penurunan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bekasi?	
7	Sejauh mana efektivitas perencanaan dan penganggaran dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi? (khusus Pj Bupati, Sekda, Kepala Bappeda dan unsur Bappeda)	
8	Apakah bapak / ibu memiliki gagasan / strategi khusus dalam rangka pencapaian target penyerapan APBD yang efektif, efisien dan tepat sasaran ?	
9	Strategi apa yang tepat diterapkan dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan?	
10	Inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi?	

LAMPIRAN II

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (Observasi) yang dilakukan mengamati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah

A. Instrument Observasi

No	Indikator Observasi	Keterangan
1	Strategi Eksisting (Yang dilaksanakan Pemerintah Daerah saat ini)	Mengobservasi strategi eksisting pemerintah daerah saat ini dalam usahanya dalam mencapai target RPJMD dan Sejauh mana tingkat kinerja perangkat daerah
2	Tingkat Penyerapan Anggaran	Mengobservasi seberapa besar penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III dan proyeksinya dalam capaian target RPJMD
3	Koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan percepatan pembangunan	Mengobservasi tingkat efektifitas koordinasi antar Perangkat Daerah

4	Efektivitas Kepemimpinan	Mengobservasi efektivitas kepemimpinan seorang kepala daerah dalam pencapaian target RPJMD di Tahun Kelima sebagai bentuk percepatan pembangunan daerah
5	Kerjasama lintas sektor (optimalisasi pentahelix)	Mengobservasi sejauh mana pelaksanaan kerjasama lintas sektor di Kabupaten Bekasi dalam rangka percepatan pembangunan
6	Responsivitas terhadap saran dan keluhan masyarakat	Mengobservasi respon pemerintah daerah dalam menerima saran dan keluhan dari masyarakat terkait pembangunan
7	Kekuatan SDM	Sejauh mana efektivitas penempatan SDM di

		Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan percepatan pembangunan, apakah sudah the right man on the right place? Atau lainnya
--	--	---



SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA

Prodi Ilmu Pemerintahan: SK BAN-PT No. 2537 / SK / BAN-PT / Akred / S / IX / 2018, Terakreditasi Peringkat "B".
Prodi Ilmu Politik : SK BAN-PT No. 2534 / SK / BAN-PT / Ak-PPJ / S / IV / 2022, Terakreditasi Peringkat "B".

Kampus :

Jl. Lenteng Agung No. 37 A, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610 Telp/Fax. : (021) 786 7996, 788 906 72, 788 906 73
Website : www.stipan.ac.id E-mail : admin@stipan.ac.id



Jakarta, 14 September 2022

No : 712/STIPAN-A/IX/2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Kepala Kesbampol Kabupaten Bekasi

Di

Kabupaten Bekasi

Dengan Hormat

Dalam Rangka Penyusunan Tesis Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (PPs, M.IP STIPAN) di Jakarta.

No	Nama	NPM	Judul	Pembimbing Ke 1	Pembimbing Ke 2
1	A. Munzir Muharram	20651010224	Strategi Intervensi Kepala Dinas Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS	Dr. Drs. Rosidi, M.Si
2	Dedy Widjaya	20651010225	Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Dr. Sumarsono, MDM	Dr. Drs. Rosodi, M.Si
3	Evi Silvia	20651010226	Implementasi pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS	Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si
4	Iwan Syahroni	20651010228	Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (Pip) Jenjang Smp Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Sumaryadi, BA, M.Si	Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si
5	Nurkholis	20651010229	Pengukuran Kinerja Pegawai Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Sumaryadi, BA, M.Si	Dr. Drs. Sofyan Safari Hamam, M.Si
6	Santi Sripujianti	20651010231	Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 440 Tahun 82020 Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Kabupaten Bekasi	Dr. Sumarsono, MDM	Dr. Drs. Sofyan Safari Hamam, M.Si

7	Muhammad Ali Amran	20651010237	Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Urusan Pemerintahan Bidang Umkm Dikecamatan Setu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Dr. Sumarsono, MDM	Dr. Rosidi, M.Si
8	Fadly Marissatrio	20651010241	Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Dr. Sumarsono, MDM	Dr. Drs. Rajanner P. Simarmata, M.Si

Dengan ini kami mohon agar Mahasiswa tersebut diberikan Izin untuk melakukan penelitian berupa Wawancara,8 Dokumentasi, Dan Data-Data Kuantitatif Maupun Kualitatif Pada Instansi dilingkungan yang Bapak / Ibu Pimpin.

Sehubungan hal tersebut diatas mohon berkenan untuk memberikan jawaban secara tertulis atas permohonan kami tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan
Abdi Negara
An. Ketua
Wakil Ketua



Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si